

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**



**LAPORAN KINERJA  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT  
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI  
TAHUN 2020**

# LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
KERJA SAMA LUAR NEGERI  
TAHUN 2020

## Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja tahun 2020 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pada tahun anggaran 2020, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk tahun 2020 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran dari setiap pembaca yang sifatnya membangun sangat sangat kami harapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Jakarta, 20 Januari 2021  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan  
Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo

## ISI

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                     | i   |
| ISI .....                                                                                                                | ii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                      | iv  |
| DAFTAR BAGAN .....                                                                                                       | v   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                       | vi  |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                                                      | vii |
| BAB I .....                                                                                                              | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                                                                                        | 1   |
| Pendahuluan .....                                                                                                        | 1   |
| Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....                                                                                        | 1   |
| Struktur Organisasi .....                                                                                                | 3   |
| Isu Strategis .....                                                                                                      | 6   |
| BAB II .....                                                                                                             | 7   |
| PERENCANAAN KINERJA .....                                                                                                | 7   |
| Sasaran Strategis .....                                                                                                  | 7   |
| Kegiatan .....                                                                                                           | 7   |
| Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 .....                                                                    | 8   |
| BAB III .....                                                                                                            | 10  |
| AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                                                              | 10  |
| Capaian Kinerja .....                                                                                                    | 10  |
| Analisis Capaian Kinerja .....                                                                                           | 12  |
| IKU 1: Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN .....                                        | 13  |
| IK 2: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan ....                            | 17  |
| IKU 3: Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Humas dan KLN .....                                                               | 22  |
| IKU 4: Nilai keterbukaan informasi publik .....                                                                          | 27  |
| IKU 5: Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama .....                                  | 30  |
| IKU 6: Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri .....   | 36  |
| IKU 7: Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang ektor Kelautan dan Perikanan ..... | 40  |
| IK 8: Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Humas dan KLN .....                                                | 47  |
| IK 9: Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN .....                                                                | 49  |

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IKU 10: Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar .....                         | 52 |
| IK 11: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN ..... | 54 |
| IK 12: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN.....                                                            | 56 |
| IK 13: Nilai Kinerja Anggaran (NKA).....                                                                                         | 59 |
| Realisasi Anggaran Biro Humas dan KLN Tahun 2020.....                                                                            | 62 |
| BAB IV .....                                                                                                                     | 63 |
| PENUTUP .....                                                                                                                    | 63 |
| Kesimpulan .....                                                                                                                 | 63 |
| Saran.....                                                                                                                       | 64 |
| BAB IV .....                                                                                                                     | 65 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                   | 65 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Menteri Kelautan dan Perikanan Meresmikan Pasar Ikan Modern di Palembang .....                                                                               | 6  |
| Gambar 2 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menutup Bulan Mutu Karantina 2020 di Bali.....                                                                   | 9  |
| Gambar 3 <i>Screen Capture</i> Aplikasi Kinerjaku tanggal 14 Januari 2021.....                                                                                        | 11 |
| Gambar 4. Dialog MKP dengan Nelayan Tegal tentang Penggunaan Cantrang.....                                                                                            | 16 |
| Gambar 5 Menteri Kelautan dan Perikanan Memberikan Arahan Dorongan Inovasi Sektor Pendidikan Kelautan dan Perikanan .....                                             | 20 |
| Gambar 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan dorong pengembangan asuransi mikro Akuakultur                                                                             | 21 |
| Gambar 7 Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penangkapan kapal asing pelaku <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> .....               | 21 |
| Gambar 8 Sekretaris Jenderal KKP Menyerahkan Arsip Statis kepada ANRI .....                                                                                           | 26 |
| Gambar 9 KKP dan TNI AL Amankan Pelaku Bom Ikan di Lombok.....                                                                                                        | 29 |
| Gambar 10 KKP dorong pengusaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi mutu produk perikanan .....                                                                     | 29 |
| Gambar 11 Menteri Kelautan dan Perikanan menerima perwakilan FAO .....                                                                                                | 39 |
| Gambar 12 Menteri Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Masduki.....                                       | 46 |
| Gambar 13 Kunjungan MKP ke Lamongan dalam rangka mendorong ekspor Ikan Kerapu hidup .....                                                                             | 48 |
| Gambar 14 Kunjungan MKP ke Nelayan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi .....                                                                                             | 48 |
| Gambar 15 Menteri KP Ad Interim Melepas Ekspor Produk Perikanan di Pelabuhan Tj Priok.....                                                                            | 61 |
| Gambar 16 Bapak Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan pidato perdana di KKP setelah dilantik Presiden RI sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di akhir tahun 2020..... | 61 |

## DAFTAR BAGAN

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bagan 1 Struktur Organisasi Biro Humas dan KLN (Berdasarkan PerMen KP No. 07/PERMEN-KP/2018) |   |
| .....                                                                                        | 2 |
| Bagan 2 Struktur Organisasi Biro Humas dan KLN .....                                         | 3 |
| Bagan 3 Peta Strategis Biro Humas dan KLN Tahun 2020.....                                    | 7 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro Humas dan KLN sampai dengan Oktober 2020 berdasarkan Jabatan ....                                                                                              | 5  |
| Tabel 2 Jumlah Pegawai Biro Humas dan KLN pada tahun 2020 pada Bagian dan Subbagian.....                                                                                                   | 5  |
| Tabel 3 Jumlah Pegawai Biro Humas dan KLN pada terhitung tanggal 27 Oktober 2020.....                                                                                                      | 5  |
| Tabel 4 Daftar Indikator Kinerja Biro Humas dan KLN Tahun 2020 .....                                                                                                                       | 9  |
| Tabel 5 Realisasi Indikator Kinerja Biro Humas dan KLN pada Tahun 2020.....                                                                                                                | 10 |
| Tabel 6 <i>Template</i> ringkasan capaian kinerja .....                                                                                                                                    | 12 |
| Tabel 7 Ringkasan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN .....                                                                                   | 13 |
| Tabel 8 Ringkasan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan .                                                                                           | 17 |
| Tabel 9 Ringkasan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Bio HKLN.....                                                                                                                     | 22 |
| Tabel 10 Ringkasan capaian IKU Nilai keterbukaan informasi publik .....                                                                                                                    | 27 |
| Tabel 11 Ringkasan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020 .....                                                                 | 30 |
| Tabel 12 Rekapitulasi realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020 .....                                                            | 31 |
| Tabel 13 Daftar realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020 berdasarkan kelompok substansi .....                                   | 34 |
| Tabel 14 Status realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti .....                                                                                                       | 35 |
| Tabel 14 Ringkasan Capaian IKU Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri.....                                              | 36 |
| Tabel 15 Butir-butir evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri Selama Tahun 2020.....                                                                          | 38 |
| Tabel 17 Ringkasan Capaian IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (t.d.d = tidak dapat dibandingkan) ..... | 40 |
| Tabel 18 Ringkasan Capaian IK Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Humas dan KLN ..                                                                                             | 47 |
| Tabel 19 Ringkasan Capaian IK Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN .....                                                                                                          | 49 |
| Tabel 20 Ringkasan Capaian IKU Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.....                                                             | 52 |
| Tabel 21 Ringkasan Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN.....                                     | 54 |
| Tabel 22 Ringkasan Capaian IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN.....                                                                                               | 56 |
| Tabel 23 Detil Realisasi IK IKPA Biro Humas dan KLN tahun 2020 .....                                                                                                                       | 57 |
| Tabel 24 Ringkasan Capaian IK NKA Biro Humas dan KLN tahun 2020.....                                                                                                                       | 59 |
| Tabel 25 Realisasi Anggaran Biro Humas dan KLN tahun 2020.....                                                                                                                             | 62 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN Tahun 2019 dan 2020 .....                                              | 14 |
| Grafik 2 Perbandingan realisasi dan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan.....                                                                       | 20 |
| Grafik 3 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2019 dan 2020.....                                         | 30 |
| Grafik 4 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri Tahun 2019 dan 2020.....          | 36 |
| Grafik 5 Perbandingan realisasi IK Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN tahun 2019, 2020 dan target akhir Renstra 2024.....                                                        | 49 |
| Grafik 6 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2019 dan 2020.....                         | 52 |
| Grafik 7 Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN Tahun 2019 dan 2020..... | 54 |
| Grafik 8 Perbandingan realisasi dan capaian IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN Tahun 2019 dan 2020 .....                                                          | 57 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Pendahuluan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama tahun 2020 (1 Januari s.d. 31 Desember 2020). Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro Humas dan KLN tahun 2020 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Humas dan KLN Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Humas dan KLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk bukti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun progress dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro Humas dan KLN dengan cara menyampaikan perkembangan pencapaian indikator kinerja tanggung jawabnya masing-masing melalui system aplikasi kinerjaku secara online ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) dan per triwulan dilakukan pembahasannya bersama dengan pengelola kinerja Biro Humas dan KLN sambil berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Kinerja Sekretariat Jenderal yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/Kepmen9KP/2020 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan, sasaran,
4. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, dan
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan panjang, dan
6. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya.

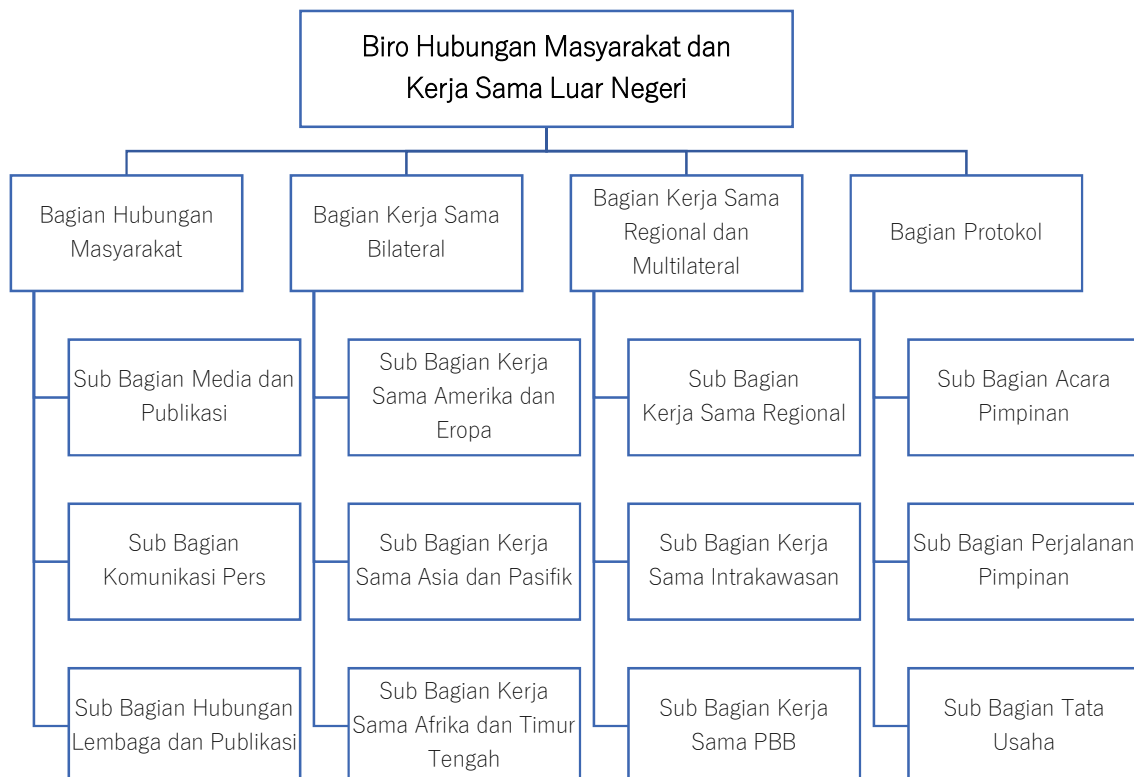
### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pada tahun 2020, Biro Humas dan KLN mengalami perubahan struktur organisasi. Sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020, struktur organisasi Biro Humas dan KLN adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/Permen-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Biro Humas dan KLN ditetapkan sebagai unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Sejak tanggal 29 September 2020, struktur organisasi Biro Humas dan KLN mengalami setelah diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/Permen-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Humas dan KLN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, pengembangan program, dan pembinaan hubungan masyarakat, kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Humas dan KLN menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja biro.

Biro Humas dan KLN dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan terdiri atas 4 (empat) bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian. Struktur Organisasi Biro Humas dan KLN dapat dilihat pada Bagan 1 berikut.

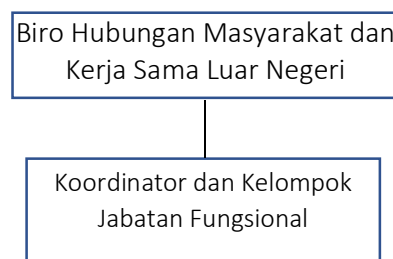


Bagan 1 Struktur Organisasi Biro Humas dan KLN (Berdasarkan PerMen KP No. 07/PERMEN-KP/2018)

Sejak 29 September 2020, Susunan organisasi Biro Humas dan KLN terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Biro Humas dan KLN sendiri adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Organigram terbaru Biro Humas dan KLN dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Bagan 2 Struktur Organisasi Biro Humas dan KLN  
(Berdasarkan PerMen KP No. 48/PERMEN-KP/2020)

## Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka sampai tanggal 29 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/Permen-KP/2018 struktur organisasi Biro Humas dan KLN terdiri dari:

### 1. Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisis media, publikasi, dan komunikasi pers, serta hubungan lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan berita dan opini publik, pengelolaan isu strategis sektor kelautan dan perikanan, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi pemberitaan media massa sektor kelautan dan perikanan, pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal di lingkungan KKP, dan pengelolaan media center;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan urusan hubungan lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
- d. Penyiapan bahan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan;
- e. Penyiapan bahan diseminasi kebijakan dan kinerja sektor kelautan dan perikanan;

- f. Pengelolaan perpustakaan KKP.

## 2. Bagian Kerja Sama Bilateral

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa, Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian kerja sama bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama dengan negara-negara yang berada di wilayah Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

## 3. Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama dengan ASEAN, intrakawasan, APEC, IORA, CTI, dan PBB di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian kerja sama multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama ASEAN dan organisasi kelautan dan perikanan regional;
- b. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama APEC, IORA, CTI, dan intrakawasan lainnya di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama dengan PBB dan kerja sama teknik di bidang kelautan dan perikanan.

## 4. Bagian Protokol

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dalam mengemban tugasnya, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan acara Menteri;
- b. Penyiapan bahan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan perjalanan Menteri; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja biro.

Sejak tanggal 27 Oktober 2020, Bagian Protokol tidak di Biro Humas dan KLN dan para pejabat struktural yang mengepalai Bagian dan Subbagian menjalani transformasi menjadi pejabat fungsional.

Sumber Daya Manusia Biro Humas dan KLN sampai dengan Oktober 2020 berjumlah 88 orang pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam 2 Tabel di bawah ini.

| No            | Jabatan/Posisi                                             | Jumlah Pegawai |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | 1              |
| 2             | Kepala Bagian                                              | 4              |
| 3             | Kepala Subbagian                                           | 11             |
| 4             | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                                 | 36             |
| 6             | PNS Menjabat Fungsional Tertentu                           | 9              |
| 7             | Pegawai BKO (Bawah Kendali Operasi) TNI                    | 7              |
| 8             | Pegawai Non PNS                                            | 20             |
| <b>Jumlah</b> |                                                            | <b>88</b>      |

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro Humas dan KLN sampai dengan Oktober 2020 berdasarkan Jabatan

| No            | Bagian                                                     | Jumlah Pegawai |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | 1              |
| 2             | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat                          | 1              |
| 3             | Subbagian Media dan Publikasi                              | 5              |
| 4             | Subbagian Hubungan Lembaga                                 | 10             |
| 5             | Subbagian Komunikasi Pers                                  | 17             |
| 6             | Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral                         | 1              |
| 7             | Subbagian KS Amerika Eropa                                 | 3              |
| 8             | Subbagian KS Asia Pasifik                                  | 4              |
| 9             | Subbagian KS Afrika Timur Tengah                           | 3              |
| 10            | Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral         | 1              |
| 11            | Subbagian PBB                                              | 4              |
| 12            | Subbagian KS Intrakawasan                                  | 2              |
| 13            | Subbagian KS Regional                                      | 2              |
| 14            | Kepala Bagian Protokol                                     | 1              |
| 15            | Subbagian Tata Usaha                                       | 18             |
| 16            | Subbagian Acara Pimpinan                                   | 12             |
| 17            | Subbagian Perjalanan Pimpinan                              | 3              |
| <b>Jumlah</b> |                                                            | <b>88</b>      |

Tabel 2 Jumlah Pegawai Biro Humas dan KLN pada tahun 2020 pada Bagian dan Subbagian

Terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020, Sumber Daya Manusia Biro Humas dan KLN berjumlah 73 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

| No            | Jabatan                                               | Jumlah Pegawai |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Kepala Biro Humas dan KLN                             | 1              |
| 2             | Pejabat Fungsional Pranata Humas                      | 8              |
| 3             | Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Perikanan      | 2              |
| 4             | Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Publik          | 5              |
| 5             | Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | 1              |
| 6             | Pejabat Fungsional Pustakawan                         | 1              |
| 7             | Pejabat Fungsional Perencana                          | 1              |
| 8             | PNS                                                   | 34             |
| 9             | Pegawai Non PNS                                       | 20             |
| <b>Jumlah</b> |                                                       | <b>73</b>      |

Tabel 3 Jumlah Pegawai Biro Humas dan KLN pada terhitung tanggal 27 Oktober 2020

## Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) merupakan permasalahan utama yang dihadapi. Oleh karena itu bagi Biro Humas dan KLN isu strategis dipandang sebagai kondisi yang harus diperhatikan/diutamakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Humas dan KLN. Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi dan menjadi perhatian Biro Humas dan KLN pada tahun 2020 adalah:

1. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan *IUU Fishing* dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia,
2. Citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan,
3. Pelayanan prima keprotokolan Menteri dan pimpinan, dan
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dan mental serta reformasi birokrasi KKP.



Gambar 1 Menteri Kelautan dan Perikanan Meresmikan Pasar Ikan Modern di Palembang

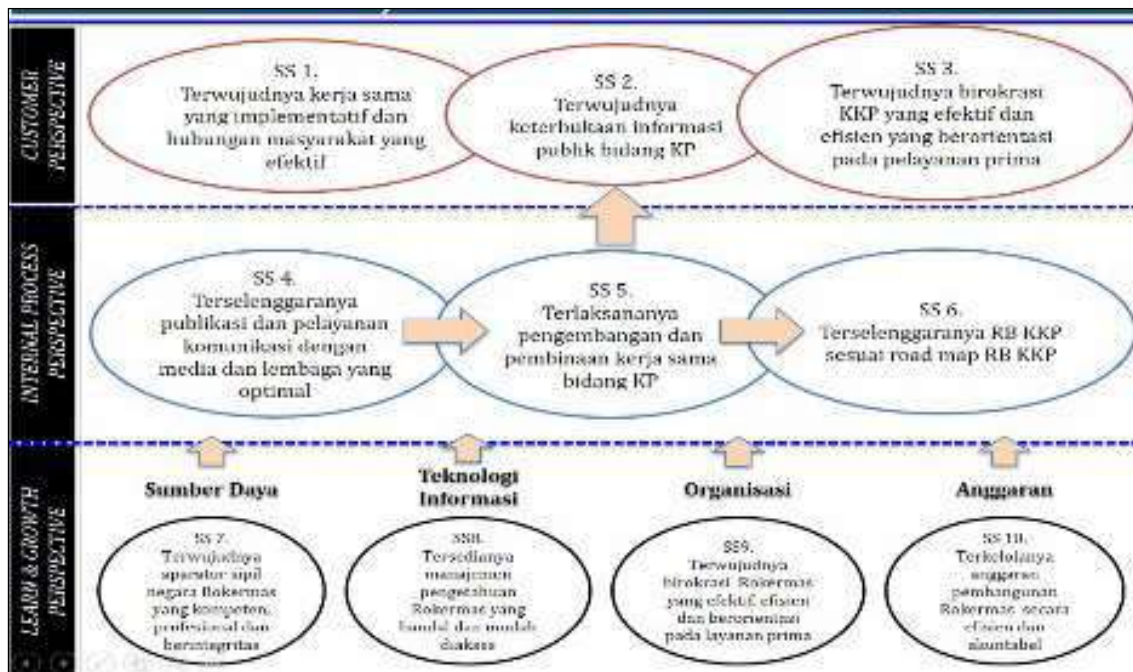
## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Untuk tingkat Eselon II, sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Eselon II yang relevan. Berdasarkan karakteristik di atas, pada awal tahun 2020 telah ditetapkan sasaran strategis Biro Humas dan KLN dibuat dalam bagan peta Sasaran Strategis di bawah ini.



Bagan 3 Peta Strategis Biro Humas dan KLN Tahun 2020

#### Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan Biro Humas dan KLN (pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri yang efektif), sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri ditindaklanjuti yang efektif. Indikator yang harus dicapai, yaitu:

1. Persentase dokumen diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama; dan
2. Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif dibanding total pemberitaan sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Biro Humas dan KLN pada awal tahun anggaran 2020 mengelola anggaran sebesar Rp 43.832.054.000 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima puluh empat ribu rupiah). Setelah dilakukan revisi dalam rangka refocusing covid-19 maka sejak April 2020 anggaran yang dikelola Biro Humas dan KLN menjadi Rp. 16.447.994.000,- (enam belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

## Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja yang di dalamnya termaktub Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sekaligus merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Perumusan perjanjian kinerja juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2020, target kinerja Biro Humas dan KLN dijabarkan ke dalam sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dan mengalami revisi target yang disebabkan revisi anggaran berupa penurunan anggaran pada awal tahun dalam rangka pemfokusan ulang untuk pembiayaan negara mengatasi pandemi Covid-19.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah membedakan IK dan IKU dengan penjelasan bahwa IK adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. IK instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core* yang diemban). IKU dipilih dari seperangkat IK yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria IK yang baik. Adapun IKU dan IK Biro Humas dan KLN serta besar targetnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



| Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama |                                                                                                                     | Target 2020 | Jenis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | 1                                         | Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan KLN (nilai)                                         | 3,55        | IKU   |
|                                                                                                | 2                                         | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan                                  | 5           | IK    |
|                                                                                                | 3                                         | Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Humas dan KLN                                                                       | 90          | IKU   |
|                                                                                                | 4                                         | Nilai keterbukaan informasi publik                                                                                  | 81          | IKU   |
|                                                                                                | 5                                         | Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama                                          | 90%         | IKU   |
|                                                                                                | 6                                         | Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri           | 100%        | IKU   |
|                                                                                                | 7                                         | Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan        | >85%        | IKU   |
|                                                                                                | 8                                         | Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Humas dan KLN                                                       | 100%        | IK    |
|                                                                                                | 9                                         | Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN                                                                       | 72          | IKU   |
|                                                                                                | 10                                        | Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar                          | 82%         | IKU   |
|                                                                                                | 11                                        | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN | 60%         | IK    |
|                                                                                                | 12                                        | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN                                                           | Baik (88)   | IK    |
|                                                                                                | 13                                        | Nilai Kinerja Anggaran (NKA)                                                                                        | 85          | IK    |

Tabel 4 Daftar Indikator Kinerja Biro Humas dan KLN Tahun 2020



Gambar 2 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menutup Bulan Mutu Karantina 2020 di Bali

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro Humas dan KLN dilakukan oleh fungsional di lingkup Tata Usaha Biro Humas dan KLN. Dalam pelaksanaan pengukuran dan pelaporan, Biro Humas dan KLN juga menggunakan aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan merupakan aplikasi baku untuk seluruh unit kerja di lingkungan KKP terkait dengan tata kelola kinerja. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum dalam manual IK/IKU yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Biro Humas dan KLN.

Realisasi dan capaian kinerja Biro Humas dan KLN tahun 2020 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah. Dalam Gambar 2, dapat dilihat *screen capture* aplikasi kinerjaku per tanggal 14 Januari 2021 dimana berdasarkan hasil penghitungan oleh aplikasi, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau skor kinerja dari Biro Humas dan KLN tahun 2020 adalah 104,29.

| Sasaran Strategis                                                                              |    | Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama                                                                           | Target 2020 | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | 1  | Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan KLN (nilai)                                         | 4,11        | 3,55      | 115,77% |
|                                                                                                | 2  | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan                                  | 4,24        | 5         | 84,80%  |
|                                                                                                | 3  | Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Humas dan KLN                                                                       | 89,05       | 90        | 98,94%  |
|                                                                                                | 4  | Nilai keterbukaan informasi publik                                                                                  | 92,08       | 81        | 113,68% |
|                                                                                                | 5  | Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama                                          | 102,82      | 90%       | 114,24% |
|                                                                                                | 6  | Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri           | 100%        | 100%      | 100%    |
|                                                                                                | 7  | Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan        | 84,65%      | >85%      | 99,59%  |
|                                                                                                | 8  | Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Bio HKLN                                                                 | 100%        | 100%      | 100%    |
|                                                                                                | 9  | Indeks profesionalitas ASN Bio HKLN                                                                                 | 54,95       | 72        | 76,32%  |
|                                                                                                | 10 | Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar                          | 100%        | 82%       | 120%    |
|                                                                                                | 11 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN | 100%        | 60%       | 120%    |
|                                                                                                | 12 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN                                                           | 98,04       | Baik (88) | 111,41% |
|                                                                                                | 13 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA)                                                                                        | 70,92       | 85        | 83,44%  |

Tabel 5 Realisasi Indikator Kinerja Biro Humas dan KLN pada Tahun 2020



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



e-Kinerja Home

Kamis, 14 Januari 2021

Capaian Unit Kerja Desember - 2020

Download Tambah

Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Skor Kinerja : 104.29

| No                  | Sasaran                                                                                        | Kode       | Indikator Kinerja                                                                                                            | Satuan                                                                                   | Polaritas | Target 2020 | Target Desember | Capaian Desember | %      | Tgl Input         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|--------|-------------------|
| 1                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.10 | Rasio Jumlah Pembentahan Netral dan Positif terhadap Total Pembentahan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan<br>Data Dukung1 | persen                                                                                   | Maximize  | 85,00       | 85,00           | 84,65            | 99,59  | 20-Jul-2020 11:28 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Gagal memenuhi target                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 2                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.11 | Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup BHKLN<br>Data Dukung1                                                             | persen                                                                                   | Maximize  | 100,00      | 100,00          | 100,00           | 100,00 | 20-Jul-2020 11:31 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 3                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.12 | Indeks profesionalitas ASN BHKLN<br>Data Dukung1                                                                             | persen                                                                                   | Maximize  | 72,00       | 72,00           | 54,95            | 76,32  | 20-Jul-2020 11:33 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Memprihatinkan                                                      |           |             |                 |                  |        |                   |
| 4                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.13 | Persentase BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar<br>Data Dukung1                                | persen                                                                                   | Maximize  | 82,00       | 82,00           | 100,00           | 120,00 | 20-Jul-2020 11:39 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 5                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.14 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN<br>Data Dukung1   | persen                                                                                   | Maximize  | 60,00       | 60,00           | 100,00           | 120,00 | 20-Jul-2020 12:10 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 6                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.15 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro HKLN<br>Data Dukung1                                                             | Nilai                                                                                    | Maximize  | 88,00       | 88,00           | 98,04            | 111,41 | 20-Jul-2020 12:34 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 7                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.16 | Nilai Kinerja Anggaran<br>Data Dukung1                                                                                       | nilai                                                                                    | Maximize  | 85,00       | 85,00           | 70,91            | 83,42  | 20-Jul-2020 12:39 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Tidak berhasil memenuhi target                                      |           |             |                 |                  |        |                   |
| 8                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.4  | Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan KLN (nilai)<br>Data Dukung1                                  | Nilai                                                                                    | Maximize  | 3,55        | 3,55            | 4,11             | 115,77 | 20-Jul-2020 11:07 |
| 9                   | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.5  | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan<br>Data Dukung1                           | Nilai                                                                                    | Maximize  | 5,00        | 5,00            | 4,24             | 84,80  | 20-Jul-2020 11:10 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 10                  | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.6  | Nilai Rekonsiliasi kinerja BHKLN<br>Data Dukung1                                                                             | nilai                                                                                    | Maximize  | 90,00       | 90,00           | 89,05            | 98,94  | 20-Jul-2020 11:16 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Target nyaris terpenuhi                                             |           |             |                 |                  |        |                   |
| 11                  | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.7  | Nilai keterbukaan informasi publik<br>Data Dukung1                                                                           | Nilai                                                                                    | Maximize  | 81,00       | 81,00           | 92,08            | 113,68 | 20-Jul-2020 11:19 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |
| 12                  | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.8  | Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama                                                   | persen                                                                                   | Maximize  | 90,00       | 90,00           | 102,82           | 114,24 | 20-Jul-2020 11:22 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Karena target sudah direvisi pertengahan 2020 maka sukses terpenuhi |           |             |                 |                  |        |                   |
| 13                  | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | IKSK.01.9  | Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri                    | persen                                                                                   | Maximize  | 100,00      | 100,00          | 100,00           | 100,00 | 20-Jul-2020 11:25 |
| Penjelasan Target : |                                                                                                |            |                                                                                                                              | Penjelasan Capaian : Jelas                                                               |           |             |                 |                  |        |                   |

Tutup

Gambar 3 Screen Capture Aplikasi Kinerja tanggal 14 Januari 2021

## Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap semua pernyataan kinerja turunan yang sebagai turunan dari sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri”. Metode analisis menggunakan arahan yang direkomendasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun/periode berjalan,
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun/periode tahun ini dengan tahun/periode yang sama tahun lalu,
- Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah di dalam dokumen rencana strategis,
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan dengan standar nasional (jika ada),
- Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang sudah dilakukan,
- Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan
- Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memudahkan menyajikan ringkasan hasil kinerja sebagaimana arahan di atas, diupayakan agar semua menggunakan *template* tabel dalam bentuk matriks di bawah ini.

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir<br>Renstra | Standar<br>Nasional | Realisasi/<br>Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                         |                     |                       |
|            |           |         |            |           |         |                         |                     |                       |

Tabel 6 *Template* ringkasan capaian kinerja

Dokumen rencana strategis yang berisi target jangka menengah dan yang menjadi dasar analisis dalam laporan kinerja ini adalah dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Adapun analisis atas realisasi dan capaian IK dan IKU Biro Humas dan KLN pada tahun 2020 secara lengkap tersaji dalam uraian di bawah ini.

## IKU 1: Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 3,55       | 4,11      | 115,77% | 3,8        | 3,63      | 95,52%  | 3,75                 | n.a.             | 109,6%            |

Tabel 7 Ringkasan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

- kelembagaan atau organisasi,
- ketatalaksanaan atau *business process*, dan
- sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/KEPMEN-KP/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan Tahun 2019, Biro Humas dan KLN menjadi penanggung jawab Reformasi Birokrasi program manajemen perubahan. Adapun Subtim RB KKP tahun 2019 mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/KEP-SJ/RBKPP/2019 tentang Subtim Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dimana Subtim masing-masing program RB berasal dari masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP.

Pelaksanaan RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan KLN dilakukan dengan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Upaya yang tetap dilaksanakan Biro Humas dan KLN demi kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan KKP selama tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan KKP dengan memupuk budaya kinerja di lingkungan KKP dan cakupan implementasi program RB sehingga terinternalisasi kepada seluruh satuan/unit kerja,
- Menugaskan *Agent of Change/role model*, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan *Agent of Change/role model* agar kegiatan ini diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan Forum Agen Perubahan untuk menyusun rencana aksi Agen Perubahan yang selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,
- Mengoptimalkan fungsi tim RB internal, sehingga implementasi RB dapat konsisten dilakukan ke seluruh unit kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Tim RB Unit Eselon I yang melibatkan kepala UPT di lingkup masing-masing Unit Eselon I. Selain itu juga dilakukan dengan menetapkan Tim Zona Integritas di lingkup UPT sebagai bagian dari RB Program Penguatan Sistem Pengawasan.

Pada tahun 2019, IKU ini bernama 'Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP bidang manajemen perubahan' dan di tahun 2020 atas arahan pimpinan dan rekomendasi Biro Perencanaan selaku pembina

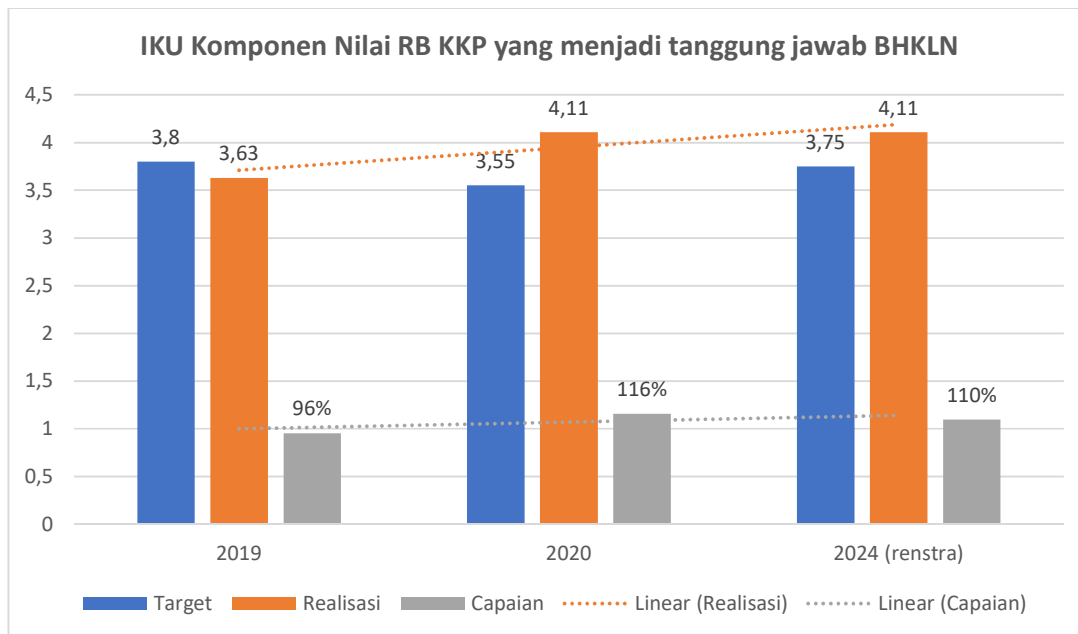
pengelolaan kinerja di lingkup Sekretariat Jenderal maka nama IKU berubah menjadi 'Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN' dan secara substansi maupun metode penghitungan tidak berubah. Target IKU ini di tahun 2019 adalah 3,8 dan berdasarkan realisasi akhir tahun 2019, maka di tahun 2020 ditetapkan target IK turun menjadi 3,55. Pada akhir tahun 2020, berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor: 2544/SJ.1/TU.210/XII/2020, hasil pengukuran IKU ini adalah 4,11. Dengan target tahun 2020 sebesar 3,55 maka capaian IKU menjadi:

$$(4,11 / 3,55) \times 100\% = 115,77\%$$

Dan jika dibandingkan dengan target akhir masa Renstra Setjen 2020-2024 yaitu sebesar 3,75 maka capaian IKU tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$(4,11 / 3,75) \times 100\% = 109,6\%$$

Tidak ditemukan standar nasional untuk IKU ini sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 untuk IKU sejenis, baik realisasi maupun capaian IKU ini mengalami kenaikan secara berturut-turut yaitu dari 3,63 menjadi 4,11 dan dari 95,52% menjadi 115,77%.



Grafik 1 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN Tahun 2019 dan 2020

Realisasi IKU ini didapat dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP tahun 2019-2020 yang dilaksanakan oleh tim asesor PMPRB KKP yang terdiri dari koordinator asesor PMPRB KKP dan ketua *quality assurance* pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KepMen-KP/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan disepakati dalam konsensus sesuai Berita Acara Hasil Konsensus Nomor BAHK.PMPRB-01/ITJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020. Berdasarkan hasil konsensus ini, maka setelah dilakukan reviu terhadap kertas kerja PMPRB KKP tahun 2019 s.d. Juni 2020 dan setelah dilakukan pembahasan dengan para asesor dan penanggung jawab program Reformasi Birokrasi terhadap seluruh area perubahan maka diperoleh

kesepakatan bahwa nilai PMPRB KKP tahun 2020 adalah sebesar 85,48 dengan rincian pada Biro Humas dan KLN sebesar 4,11.

Adapun pengungkit komponen penilaian untuk Biro Humas dan KLN pada IKU terdiri dari:

- a. Komponen penilaian pemenuhan (dengan bobot 20) untuk Manajemen Perubahan meraih angka sebesar 1,90
- b. Komponen penilaian reform (dengan bobot 30) untuk Manajemen Perubahan meraih angka sebesar 2,21

$$\text{Total nilai IKU} = 1,90 + 2,21 = 4,11.$$

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sdm aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi di KKP menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP memiliki landasan formal legal yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang diturunkan ke dalam tataran implementasinya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Dalam area manajemen perubahan yang ditanggung jawabi oleh Biro Humas dan KLN, KKP sudah memandang perubahan dan pembaharuan sebagai salah satu elemen penting pembangunan organisasi terutama saat ada urgensi menjamin kesinambungan dan eksistensi KKP dalam sistem pemerintahan yang menjalankan amanat reformasi birokrasi.

KKP menyadari penuh bahwa yang menjalankan organisasi tidak lain adalah sumber daya manusia yang cenderung terpengaruh sekaligus juga mempengaruhi atas kondisi dan situasi yang terus berkembang di sosial kemasyarakatan. Inovasi yang berkembang serta kecepatan perkembangan teknologi menggerus sistem lama yang menuntut perubahan dan pembaharuan. Meskipun begitu, perubahan tidak dipandang sebagai masalah apalagi bencana bagi KKP melainkan dikelola atau di-*manage* sebagai dorongan dan motivasi untuk terus menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga membuat KKP dapat senantiasa menyintas dan berkinerja prima. Tantangan yang muncul dari perubahan bisa berasal dari internal maupun eksternal KKP dan dipandang sebagai tanggung jawab manajemen atau tata kelola organisasi dalam pengembangan dan pembangunan organisasi.

Biro Humas dan KLN dalam pelaksanaan tanggung jawabnya pada program manajemen perubahan sebagai salah satu area Reformasi Birokrasi di tubuh KKP sepanjang tahun 2020 telah menempatkan program ini sebagai daya dorong merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai yang bisa menumbuhkan *spirit* dalam perubahan organisasi ke arah lebih baik dan profesional. Sebagaimana diketahui oleh ASN pada umumnya bahwa tujuan dari perubahan memiliki setidaknya 2 (dua) aspek yaitu yang pertama adalah untuk memperbaiki kemampuan organisasi, dalam hal ini KKP, guna penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan dan yang kedua adalah mengupayakan perubahan perilaku pegawai untuk peningkatan produktivitasnya di lembaga. Keberhasilan Biro Humas dan KLN dalam mengemban pencapaian target IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN diantaranya didorong dengan kenyataan bahwa sepanjang tahun 2020 sudah melewati tahap perencanaan, pengorganisasian/penyiapan strategi, sosialisasi, dan internalisasi pola pikir dan budaya kerja serta implementasi reformasi birokrasi pada KKP. Dengan demikian,

secara keseluruhan pada tahun 2020 KKP telah melakukan perubahan-perubahan pada area atau program manajemen perubahan yang disusun dalam *Grand Design* pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang *Grand Design* 2010-2025 Reformasi Birokrasi Indonesia. Perubahan yang terjadi tersebut setidaknya membantu KKP mencapai cita-cita Reformasi Birokrasi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi yang sudah mulai ditingkatkan serta profesionalisme SDM yang didukung oleh sistem-sistem kepegawaian yang telah diperbaharui.



Gambar 4. Dialog MKP dengan Nelayan Tegal tentang Penggunaan Cantrang

## IK 2: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target akhir | Standar  | Realisasi/ |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--------------|----------|------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Renstra      | Nasional | Renstra    |
| 5          | 4,24      | 84,8%   | 5          | 5         | 100%    | 4,6          | n.a.     | 92,17%     |

Tabel 8 Ringkasan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan

IK ini adalah *cascading* salah satu IKU Sekretariat Jenderal KKP yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 18/KEP-SJ/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2020 IKU yaitu IKU 'Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal' dengan penanggung jawab IKU adalah Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur. Nilai kinerja RB adalah nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik dan efektif sehingga aparat mampu bekerja lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Metode *cascading* IK ini komponen pembentuk untuk menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal sebagai bentuk komitmen seluruh unit kerja lingkup KKP atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP.

Selain menjadi penanggung jawab atas IK Nilai Reformasi Birokrasi KKP Program Manajemen Perubahan di lingkup KKP, Biro Humas dan KLN menjadi Koordinator Program Manajemen Perubahan untuk lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4/KEP-SJ/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian atas implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal dilaksanakan setidaknya sekali setahun melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online oleh masing-masing unit. Hasilnya diverifikasi tim asesor dari Inspektorat Jenderal. Tidak berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2020 penghitungan IK ini bersifat tahunan. Berangkat dari realisasi IK sejenis di tahun 2019 maka direncanakan pada tahun 2020 tetap melaksanakan pelaksanaan kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi RB khususnya terkait pelaksanaan pelatihan bagi Tim Asesor PMPRB dan pelaksanaan revidu kerja oleh koordinator asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi serta meningkatkan kinerja yang dilakukan di tahun 2019.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Tahun 2019-2020 nomor: BAHK.PMPRB-01/ITJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang diterima dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi IK tahun 2020 adalah 4,24. Dengan target sebesar 5 maka capaian IK ini adalah sebagai berikut:

$$(4,24 / 5) \times 100\% = 84,8\%$$

Dibandingkan tahun 2019, realisasi IK ini turun dari 5 menjadi 4,24 begitu juga dengan capaian turun dari 100% menjadi 84,8%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka pendek sebagaimana tertera dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal KKP yaitu sebesar 4,6 maka capaian IK ini adalah sebesar 92,17%. IK ini tidak memiliki acuan atau standar (baku) target di tingkat nasional sehingga tidak bisa dihitung capaiannya. Adapun pengungkit komponen penilaian untuk Biro Humas dan KLN pada IKU terdiri dari:

- Komponen penilaian pemenuhan (dengan bobot 2,00) untuk Manajemen Perubahan meraih angka sebesar 1,76

- b. Komponen penilaian reform (dengan bobot 3,00) untuk Manajemen Perubahan meraih angka sebesar 2,48

Total nilai IKU = 1,76 + 2,48 = 4,24.

Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KKP telah dibentuk di tahun 2019 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4/KEP-SJ/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Jenderal KKP dan untuk tahun 2020, tim yang sama dibentuk melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KKP dengan beberapa capaian di tahun 2019 sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan = 100%
2. Peraturan Perundang-Undangan = 100%
3. Organisasi = 100%
4. Tata Laksana = 100%
5. Sumber Daya Manusia = 100%
6. Akuntabilitas = 96%
7. Pengawasan = 90%
8. Pelayanan Publik = 100%
9. Quick Wins = 100%"

Hasil monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan = 100%
2. Peraturan Perundang-Undangan = 100%
3. Organisasi = 100%
4. Tata Laksana = 100%
5. Sumber Daya Manusia = 100%
6. Akuntabilitas = 100%
7. Pengawasan = 100%
8. Pelayanan Publik = 100%
9. Quick Wins = 100%"

Rencana kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KKP tahun 2020 memang telah disusun mengacu pada Road Map RB KKP 2020-2024. Kendalanya baru sebagian kecil anggota Tim pada tahun 2020 yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi rencana kerja RB (Road Map RB KKP 2020-2024 masih dalam bentuk draf). Rencana sosialisasi dan internalisasi sendiri akan dilakukan melalui website Setjen, Brief Note RB, media sosial, Bitrix24, pengumuman audio, banner, dan lain sebagainya. Selain itu, rencana kerja RB Setjen pada tahun 2020 belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu dan penanggung jawab. Diperkirakan, kendala utama yang menyebabkan kondisi sebagaimana disebut di atas adalah merebaknya pandemi covid-19 dimana banyak rencana kegiatan terkait Reformasi Birokrasi tidak bisa diselenggarakan sebagaimana yang sudah dijadwalkan.

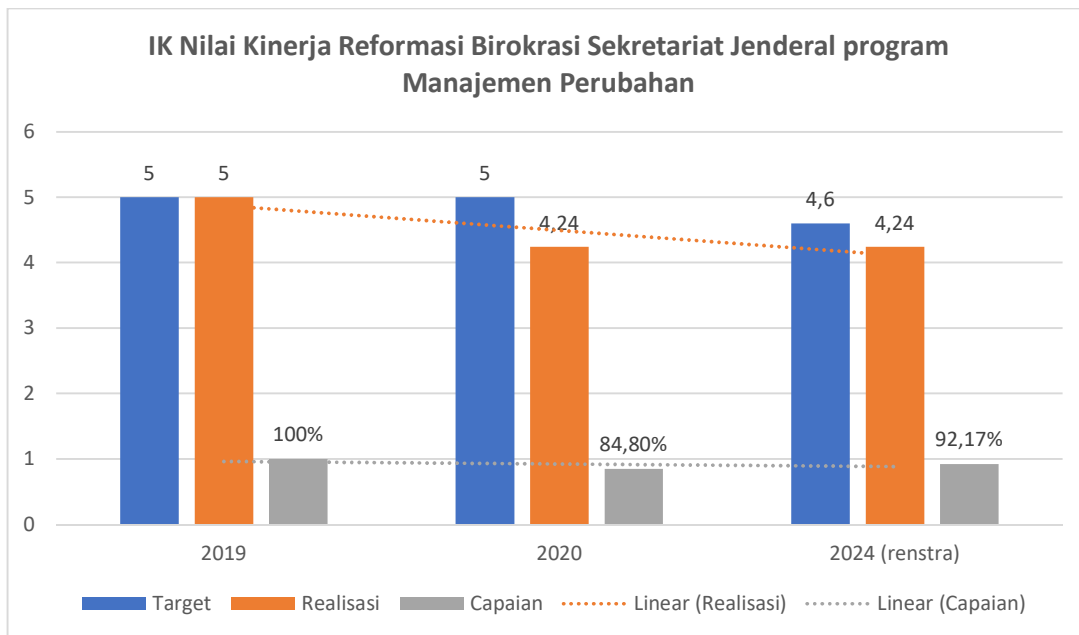
Kegagalan pemenuhan target IK ini di tahun 2020 tidak diakibatkan adanya penunjang keikutsertaan pejabat struktural level kedua pada tahun 2020 sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas yang dapat didukung oleh undangan, daftar hadir, notulen, LKE yang telah diisi, dan berita acara hasil konsensus.

Diharapkan pada tahun 2021, Biro Humas dan KLN mampu memenuhi target IK ini. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP, target IK ini tahun 2021 adalah 4,3. Biro Humas dan KLN menyadari bahwa tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi tinggi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara. Biro Humas dan KLN juga sangat memperhatikan visi Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam lembaran *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia yang artinya adalah pemerintah yang professional dan berintegrasi tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ini melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Dalam rangka memenuhi target ini, harus senantiasa diingat bahwa misi Reformasi Birokrasi untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundangundangan dalam rangka Melakukan penataan dan penguatan -organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset* dan *culture set*.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, dan
3. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Manajemen Perubahan atau *change management* merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah pergeseran organisasi dengan segenap sumber dayanya dari keadaan sekarang menuju keadaan yang lebih baik dan diinginkan. Dalam organisasi, umumnya perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Reformasi birokrasi diharapkan akan menjadi pendorong perubahan untuk membawa Sekretariat Jenderal KKP bergeser atau bergerak dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diharapkan. Karena itu, manajemen perubahan yang dikelola secara holistik, terstruktur, dan berorientasi hasil akan sangat membantu organisasi, kinerja, individu/staf di dalamnya dalam menjalani proses transisi menuju kondisi birokrasi yang diinginkan.



Grafik 2 Perbandingan realisasi dan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan



Gambar 5 Menteri Kelautan dan Perikanan Memberikan Arahan Dorongan Inovasi Sektor Pendidikan Kelautan dan Perikanan



Gambar 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan dorong pengembangan asuransi mikro Akuakultur



Gambar 7 Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penangkapan kapal asing pelaku *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

### IKU 3: Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Humas dan KLN

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019             |           |         | Target Akhir<br>Renstra | Standar<br>Nasional | Realisasi/<br>Renstra |
|------------|-----------|---------|------------------------|-----------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target                 | Realisasi | Capaian |                         |                     |                       |
| 90         | 89,05     | 98,94%  | IKU Baru di tahun 2020 |           |         | n.a.                    | n.a.                | n.a.                  |

Tabel 9 Ringkasan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Bio HKLN

Salah satu pertimbangan pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Dalam Peraturan Presiden tersebut SAKIP diterangkan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Mengacu kepada kedua peraturan di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan KKP, sejak Tahun 2013 KKP menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 juga memberikan beberapa batasan atau pengertian untuk beberapa konsep berikut yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengukuran kinerja berbasis alat manajemen *Balanced Scorecard*:

- Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan KKP untuk periode 1 (satu) tahun,
- Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi,
- Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi,
- Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja serta merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai oleh Organisasi dan dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan SS organisasi. Indikator kinerja bersifat definitif/terukur dan berfungsi untuk menyeimbangkan antara kondisi ideal dengan realitas.
- Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja,
- Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah,
- Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Selain yang disebutkan di atas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 menjelaskan Mekanisme penetapan IKU Unit kerja level II, III, IV, dan V mengacu pada mekanisme di atas serta diatur dan ditetapkan oleh masing-masing unit kerja level I terkait.

Kualitas IKU dipengaruhi oleh sifat IKU diantaranya adalah tingkat validitas dan polarisasi IKU. Pembagian level validitas IKU adalah sebagai berikut:

- a. *Leading Indicators*, yaitu indikator Kinerja yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator jenis ini bisa berada pada level input (disebut lead input) maupun proses (disebut lead process),
- b. *Lagging Indicators*, yakni indikator Kinerja yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator jenis ini bisa berada pada level output (disebut lag output) maupun outcome (disebut lag outcome).
- b. Terkait dengan polarisasi IKU, berdasarkan target capaiannya maka dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:
  - *Maximize*, yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk,
  - *Minimize*, yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk,
  - *Stabilize*, yaitu semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

Terkait dengan *cascading* IKU, maka pada saat melakukannya terlebih dahulu hendaknya dilakukan identifikasi sifat IKU yang akan di-*cascading* guna menentukan metidenya. Terdapat 4 jenis metode *cascading* IKU yaitu:

- a. Adopsi Langsung. Pada metode ini, kalimat dan definisi IKU pada level yang lebih tinggi diadopsi secara penuh oleh level yang lebih rendah serta IKU memiliki output yang identik/sama pada tiap level,
- b. Komponen Pembentuk. Pada metode ini, kalimat dan definisi IKU di unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit dengan kalimat yang berbeda sesuai dengan peran unit/satuan tersebut dalam pencapaian IKU. Hal ini karena realisasi IKU dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan kontribusi yang berbeda-beda. Realisasi dan capaian IKU pada unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari capaian IKU pada pada unit/satuan di level yang lebih rendah,
- c. Lingkup Dipersempit. Pada metode *cascading* ini, kalimat dan definisi IKU unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit kerja dengan kalimat yang serupa namun dengan ruang lingkup lebih sempit. Hal ini karena nilai IKU tersebut dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan metode yang sama namun ruang lingkup sesuai unit kerja yang melaksanakan. Realisasi dan capaian IKU unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan rata-rata dari capaian IKU unit/satuan di level yang lebih rendah, dan
- d. Buat Baru. Pada metode *cascading* ini, IKU bukan merupakan turunan dari atasannya, melainkan baru dibentuk di level yang bersangkutan. IKU dengan metode ini dapat merupakan IKU yang berkontribusi secara tidak langsung pencapaian IKU atasan, IKU yang menggambarkan tugas spesifik dari unit yang bersangkutan yang tidak berkorelasi dengan atasannya dan IKU yang dibentuk karena ada tugas khusus atau mandat (mandatory) dari atasannya. Ketentuan untuk metode *cascading* ini adalah tidak ada tanggung jawab pencapaian target yang cascaded dari unit/satuan yang lebih tinggi, target atau realisasi IKU Unit/satuan yang lebih rendah tidak dikonsolidasikan ke Unit/satuan di atasnya dan jenis output tidak identik/tidak sama.

Realisasi dan capaian IKU diukur dengan pilihan 4 (empat) frekuensi yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan serta dimasukkan datanya ke dalam aplikasi kinerjaku

(www.kinerjaku.kkp.go.id). Dalam penginputan realisasi dan capaian IKU, dilakukan secara *bottom up* yaitu dari level terendah sampai ke level tertinggi dan terhadap realisasi yang sudah diinput setiap pejabat melakukan validasi terhadap realisasi pejabat yang berada di 1 level di bawahnya. Laporan realisasi dan capaian Kinerja hanya diinput oleh level III dan IV dan dijadikan informasi dalam menyusun laporan kinerja atasan langsungnya. Verifikasi dilakukan disetiap level, dan divalidasi oleh atasan langsung. Atasan langsung wajib mengecek capaian kinerja bawahannya dan memberikan persetujuan apabila hasil perekaman telah dinilai benar atau tidak memberikan persetujuan apabila hasil perekaman dinilai belum benar dan perlu diperbaiki. Biasanya, verifikasi sistem dipantau secara berkala per 3 (tiga) bulan setelah bawahan melaporkan/menginput capaian di levelnya

Pada tahun 2020, 'Nilai rekonsiliasi kinerja' dijadikan sebagai salah satu IKU di Biro Humas dan KLN dengan target di level 2, 3 dan 4 sebesar 90. IKU ini menggantikan Indikator Kinerja 'Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Biro Humas dan KLN' yang terakhir kali dicantumkan dalam lampiran Perjanjian Kinerja di lingkup Biro Humas dan KLN tahun 2019. Meskipun IKU baru tahun 2020, kegiatan rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja sudah 2 (dua) kali dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan didampingi oleh Inspektorat Jenderal yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018, unit kerja yang terpilih sebagai target penilaian rekonsiliasi kinerja oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal adalah level yaitu Bagian Kerja Sama Bilateral, Biro Humas dan KLN dengan hasil nilai 75,81 dan level 4 yaitu Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa, Biro Humas dan KLN dan hasilnya adalah nilai 77,75. Pada tahun 2019, hanya 1 (satu) unit di lingkup Biro Humas dan KLN yang dipilih Biro Perencanaan dalam rekonsiliasi yaitu level 4 yakni Subbagian Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah dan hasilnya nilai 88,11.

## Metode

Rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dari Biro Perencanaan (dengan didampingi pegawai dari Inspektorat Jenderal KKP) dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja diharuskan untuk menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja 2020 (level 2, 3, dan 4)
- b. Manual IKU 2020 (level 2, 3, dan 4)
- c. Rincian Target IKU 2020 (level 2, 3, dan 4)
- d. Rencana Aksi 2020 (khusus level 2)
- e. LKJ Triwulan I, II, dan III 2020 (khusus level 2)
- f. LCK Triwulan I, II, dan III 2020 (khusus level 3 dan 4)
- g. Dokumen data pendukung LKJ/LCK TW III 2020 (level 2, 3, dan 4)

Rekonsiliasi juga dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen di atas serta keabsahannya dan membandingkan hasil yang termaktub di dalam dokumen-dokumen di atas dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 seluruh level dipilih Biro Perencanaan menjadi target pengukuran melalui rekonsiliasi yaitu level 2 (Kepala Biro Humas dan KLN), level 3 (dipilih Bagian Hubungan Masyarakat) dan level 4 (dipilih Subbagian Komunikasi Pers)

## Hasil

Proses rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja kepada ketiga level di Biro Humas dan KLN terangkum dalam nilai sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini:

### Level 2: Biro Humas dan KLN

| No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor per aspek | Skor x Bobot | Total Skor |
|----|-----------------|-------|----------------|--------------|------------|
| 1  | Kepatuhan       | 30%   | 92,79          | 27,84        | 89,05      |
| 2  | Kesesuaian      | 30%   | 92,31          | 27,69        |            |
| 3  | Ketercapaian    | 40%   | 100,57         | 3,52         |            |

Catatan/rekomendasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat I untuk level 2 adalah:

1. Beberapa IKU pada perjanjian kinerja tidak dilengkapi satuan target,
2. Pada rencana aksi kegiatan, output dan amggaran belum mencerminkan Indikator Kinerja yang didukung. Kolom capaian, permasalahan rekomendasi dan tindak lanjut tidak perlu dimasukkan.
3. Laporan Kinerja Triwulan 3 tidak dilengkapi lembar pengesahan yang sudah ditandatangani dan belum dimasukkan target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja.

### Level 3: Bagian Hubungan Masyarakat

| No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor per aspek | Skor x Bobot | Total Skor |
|----|-----------------|-------|----------------|--------------|------------|
| 1  | Kepatuhan       | 30%   | 92,86          | 27,86        | 93,05      |
| 2  | Kesesuaian      | 30%   | 96,64          | 28,39        |            |
| 3  | Ketercapaian    | 40%   | 28,39          | 37,25        |            |

Catatan/rekomendasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat I untuk level 3 adalah:

1. Bagian Hubungan Masyarakat sudah memenuhi seluruh dokumen saking yang dipilih untuk sampel level 3 rekonsiliasi kinerja,
2. Perbaikan perlu dilakukan pada Manual IKU terutama IKU nomor 1, 3, 4 dan 8,
3. Data dukung untuk IKU nomor 3 belum sesuai dengan capaian yang dilaporkan dan untuk IKU nomor 5, 6 dan 7 perlu dilengkapi dengan tabel rekapitulasi data capaian yang menampilkan angka yang dilaporkan ke dalam LCK dan aplikasi kinerjaku,
4. Nilai pencapaian kinerja Bagian Humas untuk triwulan I s.d III telah melampaui target yang ditetapkan agar terus ditingkatkan supaya pencapaian di Triwulan IV dapat optimum.

### Level 4: Subbagian Komunikasi Pers

| No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor per aspek | Skor x Bobot | Total Skor |
|----|-----------------|-------|----------------|--------------|------------|
| 1  | Kepatuhan       | 30%   | 95,24          | 28,57        | 94,46      |
| 2  | Kesesuaian      | 30%   | 95,24          | 28,57        |            |
| 3  | Ketercapaian    | 40%   | 111,96         | 37,32        |            |

Catatan/rekomendasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat I untuk level 4 adalah:

1. Penyesuaian penomoran urut IKU pada Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, LCK dan aplikasi kinerjaku agar dilakukan penyesuaian agar konsisten atau harmonis,
2. Target realisasi anggaran (IKU 9) pada aplikasi kinerjaku periode pelaporan triwulan 1 dan 2 tahun 2020 agar dilengkapi,
3. Data dukung siaran pers, Manajemen Pengetahuan dan realisasi anggaran agar dilengkapi,
4. Penjelasan pada LCK terkait berupa alasan pencapaian IKU agar diisi.

Hasil rekonsiliasi kinerja yang digunakan sebagai realisasi IKU ini adalah Level 2 yaitu 89,05. Dengan target IKU pada tahun 2020 adalah 90 maka capaian IKU adalah:

$$(89,05 / 90) \times 100\% = 98,94\%$$

Realisasi IKU ini meskipun nyaris memenuhi target tapi tetap dikategorikan gagal. Adapun penyebab utama dari kegagalan adalah adanya ketidakcermatan dari pelaksana dari Biro Humas dan KLN yang menghadiri rekonsiliasi. Oleh karena itu, tidak ada kata lain selain pada tahun 2021 ketidakcermatan tersebut tidak boleh lagi terulang. Target harus berhasil dipenuhi dan jika perlu realisasi Biro Humas dan KLN menjadi yang tertinggi diantara semua unit level 2 Sekretariat Jenderal.



Gambar 8 Sekretaris Jenderal KKP Menyerahkan Arsip Statis kepada ANRI

#### IKU 4: Nilai keterbukaan informasi publik

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 81         | 92,08     | 113,68% | 80         | 90,4      | 113%    | n.a.                 | n.a.             | n.a.              |

Tabel 10 Ringkasan capaian IKU Nilai keterbukaan informasi publik

Reformasi yang mencakup reformasi pada penyelenggaraan pemerintah (RB) menciptakan tuntutan baru masyarakat yaitu tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Beberapa syarat utama memenuhi terpenuhinya *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik. Modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat sehingga instansi pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan membuka diri kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi dan kebijakan yang diperlukan masyarakat serta mudah diakses dari mana saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Informasi publik sendiri berdasarkan Undang-Undang tersebut berupa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU KIP maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi (selain jenis informasi yang dikecualikan oleh undang-undang). Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait pelaksanaan tugas untuk memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan KKP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai keterbukaan informasi publik dibentuk oleh tiga indikator, yaitu:

- Indikator 1 (nilai maksimal 30%) yakni hasil penilaian pengembangan website dan pengumuman informasi
- Indikator 2 (nilai maksimal 40%) yakni hasil penilaian pelayanan informasi dan penyediaan informasi
- Indikator 3 (nilai maksimal 30%) yakni hasil penilaian presentasi

Penilaian monitoring dan evaluasi nilai keterbukaan informasi publik setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan melibatkan 8 (delapan) juri dari kalangan akademis, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa. KIP menetapkan kategori Badan Publik (diantaranya adalah KKP) berdasarkan hasil penilaian sebagai berikut:

- Tidak informatif (0-39,9)
- Kurang informatif (40-59,9)
- Cukup informatif (nilai 60-79,9),
- Menuju informatif (80-89,9), dan
- Informatif (90-100).

Berdasarkan Pers Release dari KIP tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2020 berdasarkan kategori badan publik, KKP berhasil meraih kategori informatif untuk badan publik kementerian negara dengan nilai sebesar 92,08. Dengan target IKU sebesar 81 maka capaian IKU ini adalah:

$$(92,08 / 81) \times 100\% = 113,68\%.$$

Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh KIP tahun 2020 diwarnai dengan dinamika yang lebih tinggi dan beragam akibat pandemi covid-19. KIP juga mengakui bahwa tidak semua tahap monitoring dan evaluasi diselenggarakan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu diawali dengan sosialisasi, penyampaian *Self-Assesment Questionnaire* (SAQ) yang untuk diisi Badan Publik, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi hingga tahap puncak penganugerahan. Kebanyakan proses monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik dilakukan secara *online* atau melalui *zoom meeting*.

Keberhasilan Biro Humas dan KLN dalam mencapai target ini menunjukkan bahwa Biro Humas dan KLN berhasil mempertahankan komitmen untuk menjadikan budaya keterbukaan informasi sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Biro Humas dan KLN melalui jajaran pejabat dan pegawai hubungan masyarakat menyadari bahwa memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi adalah amanat undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Biro Humas dan KLN senantiasa mengingat bahwa adalah hak semua warga negara untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Biro Humas dan KLN adalah elemen atau unit kerja KKP terdepan yang berfungsi mewujudkan penyelenggaraan negara yang memberikan informasi dan data kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terjaminnya hak masyarakat atas informasi maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan dan bisa meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterbukaan akses publik terhadap informasi yang dijalankan oleh Biro Humas dan KLN terbukti mampu memberikan motivasi yang berorientasi kepada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).



Gambar 9 KKP dan TNI AL Amankan Pelaku Bom Ikan di Lombok

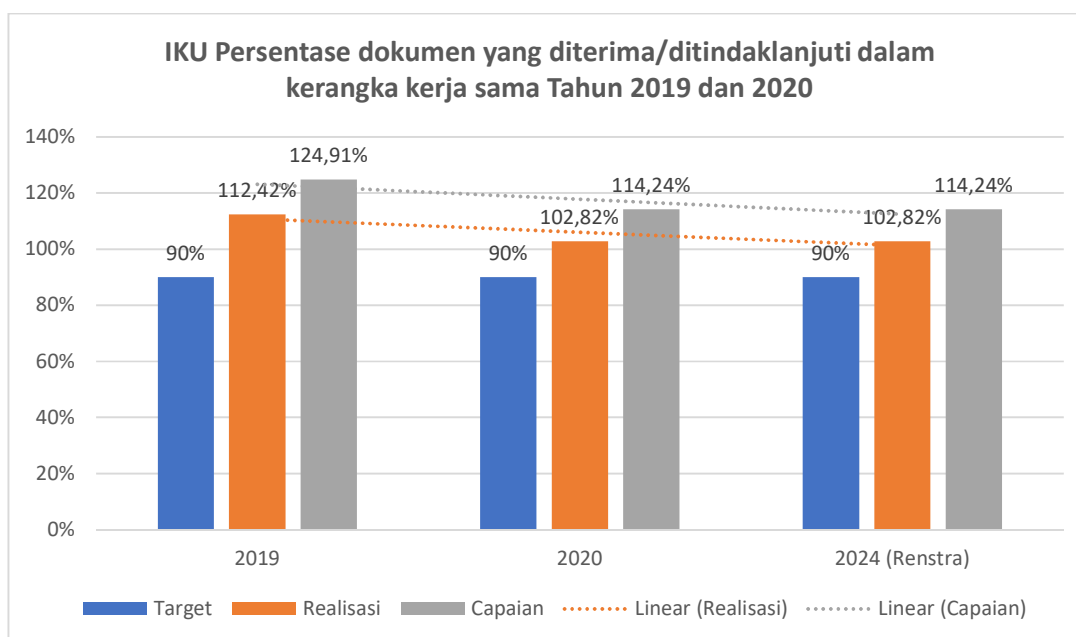


Gambar 10 KKP dorong pengusaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi mutu produk perikanan

## IKU 5: Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 90%        | 102,82%   | 114,24% | 90%        | 112,42%   | 124,71% | 90%                  | n.a.             | 112,42%           |

Tabel 11 Ringkasan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020



Grafik 3 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2019 dan 2020

Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama persentase dokumen yang diterima/ ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama pada triwulan IV 2020 sekaligus akhir tahun 2020 adalah sebesar 102.82%. Dengan demikian realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Biro Humas dan KLN untuk triwulan terakhir 2019 yaitu sebesar 90%. Dipandang dari perspektif internal Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro Humas dan KLN), keberhasilan dalam perolehan realisasi ini didorong oleh perencanaan dan pengawasan kinerja yang efektif dan dilaksanakan secara berkala sehingga senantiasa terpantau baik oleh pimpinan, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta pegawai pelaksana pengelolaan kinerja. Apabila menggunakan target pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024) maka besarnya adalah 90% sehingga capaian IKU ini sebesar 114,24%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV 2019 untuk IKU yang sama, maka pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,09% sehingga berimplikasi terhadap penurunan capaian sebesar 22,09%. Penyebab utama penurunan realisasi dan capaian IKU ini yang dapat disampaikan di sini adalah bahwa jumlah dan dinamika kegiatan dalam hubungan internasional di bidang kelautan dan perikanan pada sepanjang tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 karena sejak

bulan Maret tahun 2020, Indonesia dan seluruh negara di dunia diterpa musibah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dihentikan atau ditundanya banyak kegiatan kerja sama dan perjalanan dinas luar negeri. Meskipun demikian, penurunan realisasi dan capaian ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Biro Humas dan KLN karena sudah melampaui target.

Pada akhir tahun 2020, beberapa kegiatan kerja sama luar negeri bilateral, regional dan multilateral yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian diantaranya adalah:

- a. Penyampaian kertas posisi RI pada 14th *Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy*,
- b. Penyampaian kertas posisi RI pada *Special Virtual BIMP-EAGA Fisheries Working Group Meeting*,
- c. Penyampaian kertas posisi delegasi RI pada *The Forty-Second Meeting of The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (PrepSOM – 42nd AMAF)*, dan
- d. *ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Fisheries, 2021-2025 Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Toward 2030*

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan IKU ini sepanjang tahun 2020 terutama disebabkan oleh pandemi global penyakit coronavirus sehingga pada hubungan bilateral antara Indonesia dengan satu negara mitra kerja sama sektor Kelautan dan Perikanan yaitu Bangladesh, Papua Nugini dan Timor Leste tidak bisa diperoleh tindak lanjut kesepakatan kerja sama yang ada. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah siap untuk melakukan pelaksanaan dan tindak lanjut dari kesepakatan yang tertuang di dalam MoU dengan ke-3 negara tersebut. Akan tetapi, sampai akhir triwulan 4 tahun 2020 belum dapat mengimplementasikan komitmen dikarenakan faktor eksternal pandemi covid-19 dan skala prioritas kegiatan kerja sama luar negeri di negara-negara tersebut.

Capaian IKU ini diperoleh dari rata-rata capaian substansi Sama Bilateral dengan substansi-substansi lingkungannya yaitu substansi Kerja Sama Amerika Eropa, substansi Kerja Sama Asia Pasifik dan substansi Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah dan substansi Kerja Sama Regional dengan substansi-substansi lingkungannya yaitu substansi Kerja Sama Regional, substansi Kerja Sama Intrakawasan dan substansi Kerja Sama PBB. Adapun detail capaian seluruh substansi dapat dilihat dalam 2 tabel di bawah ini.

| No | Substansi       | Akumulasi Realisasi s.d. Tw IV (diterima/tindak lanjut) | Σ Kerja Sama Aktif | Persentase (akumulasi : ΣKS aktif) x 100% |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1  | KS Amerop       | 10                                                      | 10                 | 100,00%                                   |
| 2  | KS Aspas        | 10                                                      | 13                 | 76,92%                                    |
| 3  | KS Aftimteng    | 4                                                       | 4                  | 100,00%                                   |
| 4  | KS Regional     | 9                                                       | 9                  | 100,00%                                   |
| 5  | KS Intrakawasan | 7                                                       | 5                  | 140,00%                                   |
| 6  | KS PBB          | 10                                                      | 10                 | 100,00%                                   |
|    |                 |                                                         |                    | Rata-rata = 102,82%                       |

Tabel 12 Rekapitulasi realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Akumulasi Realisasi}}{\text{Jumlah Kerja Sama Aktif}} = \text{Rata-rata persentase} = 102,82\%$$

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} : \text{Target} = 102,82 : 90 = 114,24\%$$

Daftar realisasi IKU per substansi:

| No | Substansi | Kegiatan realisasi                                                                                                                                                                                                          | Mitra             | Bulan     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1  | KS Amerop | Pelaksanaan Kegiatan <i>Training Marine Spatial Planning dan Carrying Capacity</i>                                                                                                                                          | Norwegia          | Januari   |
| 2  | KS Amerop | Menghadiri Rapat Persiapan Kunjungan Perdana Menteri Hongaria, Y.M. Viktor Orban ke Indonesia                                                                                                                               | Hongaria          | Januari   |
| 3  | KS Amerop | Menghadiri rapat koordinasi persiapan Pertemuan Ke-4 WGTII RI-Rusia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat                                                                                    | Rusia             | Januari   |
| 4  | KS Amerop | Bahan untuk Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat dalam rangka pengembangan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI USA                                                                                                           | Amerika Serikat   | Januari   |
| 5  | KS Amerop | Berita Acara Serah Terima Hibah Portofolio Lingkungan Hidup USAID (AA. No 479-030) kegiatan <i>Strengthening Fisheries Governance and the Maritime Law Enforcement Response (Interpol) Project</i>                          | USAID             | Januari   |
| 6  | KS Amerop | Rapat Interkem Working Group on Economic Cooperation and Capacity Building (WG-ECCB)                                                                                                                                        | Uni Eropa         | Februari  |
| 7  | KS Amerop | Penyampaian dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Technical Assistance to Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port) untuk dibiayai juga melalui Hibah Luar Negeri (Grant) dari Agence Francaise de Development (AFD). | Perancis          | Juli      |
| 8  | KS Amerop | Koordinasi antara Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dan Bank Pembangunan Jerman KfW dengan Kementerian/Lembaga Terkait (termasuk KKP)                                                      | Jerman            | Juli      |
| 9  | KS Amerop | Penyampaian masukan tentang Kerja Sama Global Fishing Watch (GFW)                                                                                                                                                           | GFW               | September |
| 10 | KS Amerop | Pembahasan tindak lanjut kerja sama Building with Nature (BwN) dengan Belanda                                                                                                                                               | Belanda           | Oktober   |
| 11 | KS Aspas  | Bahan untuk Kunjungan Pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pihak Australia                                                                                                                                       | Australia         | Januari   |
| 12 | KS Aspas  | Penyampaian tanggapan counterdraft kerja sama kelautan dan perikanan RI-Brunei Darussalam                                                                                                                                   | Brunei Darussalam | Februari  |
| 13 | KS Aspas  | Grant from Japanese for Development of Fisheries Sector in Outer Islands                                                                                                                                                    | Jepang            | Februari  |
| 14 | KS Aspas  | Rapat Persiapan Senior Official Meeting dan Working Group Joint Committee Economic Cooperation, RI-South Korea                                                                                                              | Korea Selatan     | Februari  |
| 15 | KS Aspas  | Penyampaian tanggapan counterdraft kerja sama kelautan dan perikanan RI-Fiji                                                                                                                                                | Fiji              | Februari  |
| 16 | KS Aspas  | Menghadiri Rapat Insiden kapal penangkap ikan asal Vietnam                                                                                                                                                                  | Viet Nam          | April     |
| 17 | KS Aspas  | Penyampaian tanggapan counterdraft kerja sama kelautan dan perikanan RI-India                                                                                                                                               | India             | Juli      |
| 18 | KS Aspas  | Rapat Penyusunan PoA Comprehensive Partnership (2020 – 2024) RI-New Zealand                                                                                                                                                 | Selandia Baru     | Juli      |
| 19 | KS Aspas  | Pendampingan inspeksi ke UPI milik KKP untuk memastikan prosedur pengamanan produk perikanan sesuai dengan Standart Internasional dalam kerangka                                                                            | RRT               | September |

|    |                 |                                                                                                                                                                                         |                       |           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|    |                 | kerja sama RI-RRT                                                                                                                                                                       |                       |           |
| 20 | KS Aspas        | Koordinasi kerja sama RI-Sri Lanka                                                                                                                                                      | Sri Lanka             | Oktober   |
| 21 | KS Aftimteng    | Penyampaian Deliverables Kunjungan Presiden RI ke Persatuan Emirat Arab                                                                                                                 | Persatuan Emirat Arab | Januari   |
| 22 | KS Aftimteng    | Courtesy call Duta Besar Mozambik dengan Menteri KP                                                                                                                                     | Mozambik              | Januari   |
| 23 | KS Aftimteng    | Permohonan Penyampain Usulan Pembahasan PoA Implementasi MoU Kerja Sama di Bidang Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi melalui Video Conference                                         | Arab Saudi            | Juni      |
| 24 | KS Aftimteng    | Webinar on Aquaculture for Shrimp, Sea Cucumber and Seaweeds Indonesia-Maroko, kerja sama Bappenas, KKP dan Islamic Development Bank (IsDB).                                            | Maroko                | September |
| 25 | KS Regional     | <i>First Meeting Of The Asean Senior Economic Officials For The Fifty First Asean Economic Ministers Meeting (Seom 1/51)</i>                                                            | ASEAN                 | Januari   |
| 26 | KS Regional     | <i>1st Technical Workshop on Development of ASEAN General Fishery Policy Feasibility Studies</i>                                                                                        | ASEAN                 | Mei       |
| 27 | KS Regional     | Kertas Posisi Delegasi RI the 52nd SEAFDEC Council Meeting, Virtual Teleconference                                                                                                      | SEAFDEC               | Mei       |
| 28 | KS Regional     | Kertas Posisi Delegasi RI pada the Twenty Seventh Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGF), Brunei Darussalam, Virtual Meeting                             | ASEAN                 | Juni      |
| 29 | KS Regional     | Kertas Posisi Delegasi RI pada Special Virtual BIMP-EAGA Fisheries Working Group Meeting                                                                                                | BIMP-EAGA             | Oktober   |
| 30 | KS Regional     | Kertas Posisi Delegasi RI pada The Forty-Second Meeting of The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (PrepSOM – 42nd AMAF)                                                        | ASEAN                 | Oktober   |
| 31 | KS Regional     | <i>ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Fisheries, 2021-2025 Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Toward 2030</i> | ASEAN                 | Oktober   |
| 32 | KS Regional     | Kertas Posisi Delegasi RI pada the 43rd Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Program Committee Meeting                                                                | SEAFDEC               | November  |
| 33 | KS Regional     | "Kertas Posisi Delegasi RI pada the 23rd Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG-ASSP)                                                  | SEAFDEC               | November  |
| 34 | KS Intrakawasan | Workshop on Developing Small-Scale Business for Coastal Women Community Based on Digital Economy                                                                                        | APEC                  | Februari  |
| 35 | KS Intrakawasan | Workshop on Elaboration of the Community-Based Surveillance                                                                                                                             | WTO                   | Februari  |
| 36 | KS Intrakawasan | Masukan KKP untuk IORA Concept Note on Marine Debris dan IUUF                                                                                                                           | IORA                  | April     |
| 37 | KS Intrakawasan | Masukan KKP untuk Secretariat Report Section 3 Part 2 WTO TPR Indonesia ke-7                                                                                                            | WTO                   | April     |
| 38 | KS Intrakawasan | Implementation Plan for the Roadmap on Combatting Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing                                                                                     | APEC                  | Juni      |
| 39 | KS Intrakawasan | APEC Marine Debris Roadmap: Implementation Plan                                                                                                                                         | APEC                  | Juni      |

|    |                 |                                                                                         |     |           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 40 | KS Intrakawasan | Masukan KKP untuk Concept Note, TOR dan Work Plan IORA CGFM                             | WTO | Juni      |
| 41 | KS PBB          | Kertas Posisi Indonesia Transformations Toward a Sustainable Ocean Economy              | PBB | Februari  |
| 42 | KS PBB          | Kertas Posisi Virtual Sherpa Meeting, 12-13 Mar2020                                     | PBB | Maret     |
| 43 | KS PBB          | Kertas Posisi 76th session Economic and Social Commission for Asia and the Pacific      | PBB | Mei       |
| 44 | KS PBB          | Kertas Posisi Audiensi Virtual HLP Co-Chair dan MKP, 15 Juni 2020                       | PBB | Juni      |
| 45 | KS PBB          | Kertas Posisi Audiensi Virtual UNIDO-MKP                                                | PBB | Juni      |
| 46 | KS PBB          | Kertas Posisi RI pada 164th Session of the FAO Council                                  | FAO | Juli      |
| 47 | KS PBB          | Kertas Posisi Fisheries and Aquaculture Sustainability: Lesson Learned from SOFIA       | PBB | Juli      |
| 48 | KS PBB          | Kertas Posisi DelRI pada 12th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy | PBB | Agustus   |
| 49 | KS PBB          | Kertas Posisi DelRI pada 13th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy | PBB | September |
| 50 | KS PBB          | Kertas Posisi RI pada 14th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy    | PBB | Oktober   |

Tabel 13 Daftar realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020 berdasarkan kelompok substansi

Status implementasi/tindak lanjut atas kerja sama aktif pada setiap subbagian di Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan akhir tahun 2020 dielaborasi dalam tabel di bawah ini.

| No | Substansi        | Kerja Sama Aktif |                                                                                      | Status Kerja Sama s.d. Akhir 2020 |
|----|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | KS Amerika Eropa | 1                | Kerja sama bilateral kerangka Plan of Action Republik Indonesia-Amerika Serikat      | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 2                | Kerja sama bilateral Republik Indonesia (RI) - Belanda                               | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 3                | Kerja sama bilateral RI-Hungaria                                                     | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 4                | Kerja sama bilateral RI-Jerman                                                       | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 5                | Kerja sama bilateral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) - Global Fishing Watch | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 6                | Kerja sama bilateral KKP-USAID                                                       | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 7                | Kerja sama bilateral RI-Norwegia                                                     | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 8                | Kerja sama bilateral RI-Perancis                                                     | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 9                | Kerja sama bilateral RI-Rusia                                                        | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 10               | Kerja sama bilateral RI-Uni Eropa                                                    | Sudah ada tindak lanjut           |
| 2  | KS Asia Pasifik  | 1                | Kerja sama bilateral RI-Australia                                                    | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 2                | Kerja sama bilateral RI-Bangladesh                                                   | Belum                             |
|    |                  | 3                | Kerja sama bilateral RI-Brunei Darussalam                                            | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 4                | Kerja sama bilateral RI-Fiji                                                         | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 5                | Kerja sama bilateral RI-India                                                        | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 6                | Kerja sama bilateral RI-Jepang                                                       | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 7                | Kerja sama bilateral RI-Korea Selatan                                                | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 8                | Kerja sama bilateral RI-Papua Nugini                                                 | Sudah ada tindak lanjut           |
|    |                  | 9                | Kerja sama bilateral RI-Republik Rakyat                                              | Sudah ada tindak lanjut           |

|   |                        |    |                                                                                             |                                           |
|---|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   |                        |    | Tiongkok                                                                                    |                                           |
|   |                        | 10 | Kerja sama bilateral RI-Selandia Baru                                                       | Sudah ada tindak lanjut                   |
|   |                        | 11 | Kerja sama bilateral RI-Sri Lanka                                                           | Sudah ada tindak lanjut                   |
|   |                        | 12 | Kerja sama bilateral RI-Timor Leste                                                         | Belum                                     |
|   |                        | 13 | Kerja sama bilateral RI-Viet Nam                                                            | Belum                                     |
| 3 | KS Afrika Timur Tengah | 1  | Kerja sama bilateral RI-Arab Saudi                                                          | Sudah ada tindak lanjut                   |
|   |                        | 2  | Kerja sama bilateral RI-Maroko                                                              | Sudah ada tindak lanjut                   |
|   |                        | 3  | Kerja sama bilateral RI-Mozambik                                                            | Sudah ada tindak lanjut                   |
|   |                        | 4  | Kerja sama bilateral RI-PEA                                                                 | Sudah ada tindak lanjut                   |
| 4 | KS Regional            | 9  | Keanggotaan RI dalam ASEAN, SEAFDEC, RFMO, NACA, BIMP-EAGA, IMT-GT, RPOA-IUU dan RCEP       | 9 implementasi dari 9 yang direncanakan   |
| 5 | KS Intrakawasan        | 5  | Keanggotaan RI dalam WTO, APEC, APEC-OWFG, IORA dan keikutsertaan dalam forum G-20 dan OECD | 7 implementasi dari 5 yang direncanakan   |
| 6 | KS PBB                 | 10 | Keanggotaan RI dalam PBB dan organisasi di dalamnya yaitu FAO, IMO dan UFCCC                | 10 implementasi dari 10 yang direncanakan |

Tabel 14 Status realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti

Hal-hal yang menyebabkan realisasi IKU ini sebesar 102,82% sehingga melampaui target akhir 2020 adalah kendati banyak terkendala oleh pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Tepatnya implementasi kerja sama PBB, Regional dan Intrakawasan dari jadwal indikatif penyelenggaraannya melalui pertemuan yang dilakukan secara virtual,
2. Dinamika kerja sama luar negeri tetap dinamis dan membutuhkan keikutsertaan/partisipasi KKP melalui Biro Humas dan KLN dan unit kerja lingkup KKP lainnya khususnya dalam kerangka kerja sama PBB, Regional dan Intrakawasan
3. Strategisnya dan pentingnya posisi Indonesia pada umumnya dan KKP pada khususnya dalam percaturan kebijakan kelautan dan perikanan di tingkat internasional beserta implementasinya. Hal ini menyebabkan beberapa partisipasi delegasi RI (dari Biro HMKSLN) dalam kegiatan kerja sama luar negeri bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam kerangka kerja sama PBB, Regional dan Intrakawasan untuk diikuti

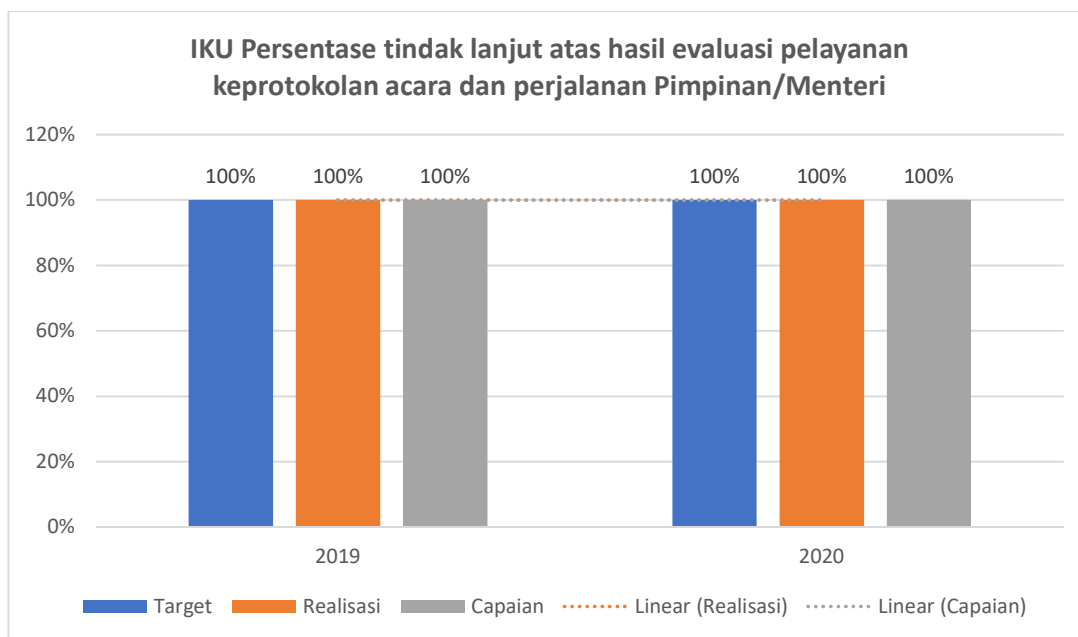
Rencana ke depan:

1. Subkoordinator dan staf yang mengerjakan substansi kerja sama Asia Pasifik mengupayakan terselenggaranya implementasi/tindak lanjut di tahun 2021 kerja sama bilateral RI - Bangladesh, RI - Papua Nugini, dan RI -Timor Leste termasuk RI - Sri Lanka dalam bidang-bidang ruang lingkup kesepakatan bilateral terkait yang ada,
2. Seluruh koordinator dan subkoordinator substansi Kerja Sama Bilateral dan substansi Kerja Sama Regional dan Multilateral yang telah melampaui target tahunan dan hendaknya segera menyusun laporan hasil kerja dan evaluasi pencapaian 2020 serta menyusun perencanaan dan target kinerja untuk tahun anggaran 2021.

## IKU 6: Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 100%       | 100%      | 100%    | 100%       | 100%      | 100%    | n.a.                 | n.a.             | n.a.              |

Tabel 15 Ringkasan Capaian IKU Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri



Grafik 4 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri Tahun 2019 dan 2020

### Capaian

Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.7/PERMENKP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Humas dan KLN. Salah satu dampak perubahan ini adalah tugas dan fungsi keprotokoleran yang sebelumnya berada di Biro Umum selanjutnya berada di Biro Humas dan KLN. Kegiatan keprotokoleran terdiri dari acara Pimpinan dan perjalanan Pimpinan. Kendati sejak akhir September 2020 fungsi pelayanan keprotokolan Menteri dan pimpinan yang dipegang oleh Bagian Protokol Biro Humas dan KLN berpindah tempat ke Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa namun tanggung jawab monitoring, evaluasi atas realisasi dan capaian kinerja yang diformulasikan ke dalam IKU Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri masih berada di Biro Humas dan KLN sampai dengan akhir tahun anggaran 2020. Dengan demikian, pelaporan realisasi dan capaian IKU ini juga masih berada di Biro Humas dan KLN.

Ruang lingkup kegiatan Acara Pimpinan meliputi penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan acara Menteri dan Pimpinan, termasuk pelaksanaan upacara rutin lingkup KKP. Sedangkan ruang lingkup kegiatan perjalanan Menteri dan Pimpinan adalah:

1. Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan,
2. Pengaturan agenda,
3. Koordinasi teknis perjalanan pimpinan dengan pihak terkait,
4. Pengaturan transportasi dan akomodasi,
5. Pengaturan hal teknis pendukung lainnya,,
6. Menyusun hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban, dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis/lisan.

Berdasarkan ruang lingkup dari kegiatan acara dan perjalanan Menteri dan pimpinan maka IKU ini dirumuskan sebagai IKU yang baru di tahun 2020. Dalam Tabel 10 terlihat bahwa seluruh target IKU bisa direalisasikan sebesar 100% pada tahun 2020 sehingga capaiannya juga adalah 100%. Beberapa hal berikut diyakini menjadi pendorong tercapainya IKU ini, yaitu:

- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP dan Protap dan bahan evaluasi,
- Koordinasi intensif tentang agenda kegiatan dengan pihak terkait,
- Sarana dan prasarana yang memadai,
- Tertib administrasi dan pertanggungjawaban, dan
- Integritas dan tanggung jawab ASN Subbagian Acara Pimpinan dan Perjalanan Pimpinan

Sebagaimana tercantum dalam tabel dan grafik di atas, realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Pelayanan Keprotokolan Acara dan Perjalanan Pimpinan/Menteri pada tahun 2020 adalah 100%. Dengan target realisasi pada tahun ini sebesar 100% maka capaian IKU ini menjadi sebesar 100%. Hasil dari pencapaian kinerja pada akhir tahun 2020 tidak berbeda dengan yang diperoleh pada tahun 2019 juga dengan hasil di triwulan 1 sampai dengan 3. Hal ini berarti tim protokol di Biro Humas dan KLN mampu mempertahankan kualitas layanan dan konsistensi kinerja serta ketaatan terhadap prosedur tetap yang sudah disediakan oleh Biro Humas dan KLN. IKU ini tidak memiliki acuan atau standar nasional. Juga realisasi IKU ini di tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2024 karena fungsi pelayanan protokol sudah tidak lagi di Biro Humas dan KLN. Diharapkan melalui pencapaian IKU ini yang sebesar 100% berimplikasi positif kepada kinerja pimpinan dan menteri Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Bentuk riil dari implementasi IKU ini adalah tindak lanjut atas butir-butir evaluasi atas layanan keprotokolan acara dan perjalanan pimpinan/Menteri sepanjang tahun 2020. Adapun daftar butir-butir evaluasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

| No | Evaluasi                                                                   | Status tindak lanjut  | Keterangan                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terdapat protokol kesehatan di masa pandemi yang tidak dilaksanakan        | Telah ditindaklanjuti | Dokumen <i>check list</i> acara pimpinan di masa pandemi                |
| 2  | Terdapat kendala mobilisasi dan transportasi rangkaian pendamping pimpinan | Telah ditindaklanjuti | Dokumen <i>check list</i> perjalanan pimpinan di masa pandemic          |
| 3  | Terdapat kejadian kerumunan pada saat acara pimpinan                       | Telah ditindaklanjuti | Dokumen panduan <i>layout</i> acara di masa pandemic                    |
| 4  | Terdapat peserta acar yang diketahui kemudia terinfeksi virus covid-19     | Telah ditindaklanjuti | Tersedia tenaga kesehatan pengambilan sampel PCR, antibody atau antigen |

Tabel 16 Butir-butir evaluasi pelayanan keprotokolkan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri Selama Tahun 2020

Peran protokoler ini strategis dalam organisasi pemerintah terlebih pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, karena tidak hanya memberikan pelayanan publik yang prima terhadap pimpinan dan menteri saja tetapi juga kepada tamu kehormatan baik dari dalam maupun luar negeri. Pelayanan protokoler juga memiliki fungsi *public relations* (hubungan masyarakat ) karena penyajian layanan prima terhadap tamu/ pihak dari luar dapat membentuk citra dan persepsi positif kepada KKP ini secara keseluruhan. Terdapat adagium terkenal dalam dunia keprotokolkan yaitu “Jika acara berhasil maka tidak ada satupun peserta yang ingat siapa yang berada di belakang keberhasilan tetapi jika ada kesalahan dalam acara maka tidak ada satupun peserta yang lupa akan kesalahan”.

Pelayanan publik adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh publik (internal dan eksternal) sebagai pengguna jasa layanan. Pada dasarnya pelayanan publik ini merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani) dalam bentuk abstrak atau tidak konkret serta tidak dapat dimiliki. Sedangkan pelayanan prima yang merupakan terjemahan dari istilah *excellent service* secara harfiah berarti pelayanan yang sangat terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan prima termasuk keprotokolkan mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Secara garis besar, tentu saja pelayanan prima merupakan pelayanan yang diberikan secara maksimal untuk kepuasan maksimal pengguna jasanya.

Protokol merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan di dunia modern. Banyak kegagalan acara atau kegiatan disebabkan karena buruknya protokoler suatu acara atau kegiatan. Itulah sebabnya banyak lembaga pemerintah khususnya pusat menyusun protokoler secara rapi dengan menempatkan pejabat struktural dan stafnya untuk menjalankan tugas khusus mengerjakan kegiatan-kegiatan keprotokolkan. Keprotokolkan meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kegiatannya mengatur mekanisme suatu acara dan perjalanan pimpinan dan Menteri baik kategori resmi maupun tidak resmi. Tujuan dari layanan keprotokolkan di KKP adalah menjadikan lembaga pemerintah sebagai organisasi yang berwibawa, berdisiplin, tertib, rapi, solid, kompak, teratur, elegan dan profesional dalam menjalankan suatu acara dan perjalanan pimpinan dan Menteri.

Sepanjang tahun 2020, Bagian Protokol Biro Humas dan KLN senantiasa konsisten menerapkan semua item yang harus disediakan dan dijalankan dalam berbagai bentuk acara dan perjalanan pimpinan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagian Protokol Biro Humas dan KLN memiliki item yang berbeda untuk setiap bentuk acara dan perjalanan yang berbeda yang dituangkan di dalam prosedur operasional baku. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak menimbulkan butir-butir evaluasi untuk layanan keprotokolan, perkembangan situasi dan kondisi khususnya eksternal di tahun 2020 cukup mencolok dalam dinamika penyajian keprotokolan di KKP yaitu merebaknya pandemi covid-19. Kondisi ini memunculkan butir-butir evaluasi yang baru sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 di atas. Meskipun dengan keterbatasan dana akibat refocusing anggaran tahun 2020, Bagian Protokol Biro Humas dan KLN mampu dengan sigap menindaklanjuti seluruh butir evaluasi tersebut agar menjamin pelayanan prima bagi pimpinan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Bagian Protokol BHKLN dalam rangka pengejawantahan IKU Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri berhasil menunjukkan nilai-nilai berikut dalam pelayanannya:

- a. Disiplin, loyalitas tinggi, kreatif dan proaktif,
- b. Pengelola yang efektif, koordinatif, bersinergi dan berwibawa,
- c. Menghayati dan memahami bidang tugasnya,
- d. Menguasai dan mampu mengatasi segala permasalahan lapangan,
- e. Memiliki wawasan yang luas dan berkembang, dan
- f. Memiliki penampilan, etiket, dan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik.



Gambar 11 Menteri Kelautan dan Perikanan menerima perwakilan FAO

## IKU 7: Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Ektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP. IKU Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan adalah persentase berita dengan sentiment atau tendensi atau *tone* netral dan positif tentang sektor kelautan dan perikanan yang dihadirkan melalui media massa dalam bentuk *online*, cetak dan audio visual dalam kurun periode tertentu yaitu triwulan dan tahun. Secara langsung atau tidak langsung IKU bermanfaat memberikan informasi secara timbal balik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat yang menelurkan kebijakan-kebijakan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kepada masyarakat mengenai penilaian pers atas kondisi-kondisi lapangan sektor kelautan dan perikanan yang terekam dan dipublikasikan melalui media.

Implementasi IKU ini merupakan salah satu wujud KKP melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro Humas dan KLN) sebagai unit kerja pembina dan pelayanan penerangan masyarakat dan komunikasi publik di KKP dalam mendukung Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dimana di dalamnya mengamanatkan terbentuknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelumnya, pada tahun 2016 sampai dengan 2019, Biro Humas dan KLN menanggungjawab IKU 'Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang KKP' namun berdasarkan arahan pimpinan, sejak tahun 2020 Biro Humas dan KLN mengganti IKU menjadi 'Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan' sehingga ruang lingkup berita yang termasuk ke dalam pengukuran berubah dari KKP menjadi sektor kelautan dan perikanan. Rekapitulasi hasil dan analisis pengukuran IKU 'Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan' pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| >85%       | 84,65%    | 99,59%  | t.d.d.     | t.d.d.    | t.d.d.  | >81%                 | n.a.             |                   |

Tabel 17 Ringkasan Capaian IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (t.d.d = tidak dapat dibandingkan)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi IKU rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2020 adalah 99,59% sehingga Biro Humas dan KLN nyaris berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu lebih besar dari pada 85%. Capaian IKU adalah 99,59%, dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = (1 + (1 - (\text{target} / \text{realisasi})) \times 100\% = (1 + (1 - (85 / 84,65))) \times 100\% = 99,59\%$$

Adapun perolehan kinerja IKU ini dengan status “sukses yang tertunda” di tahun 2020 terutama disebabkan oleh maraknya pemberitaan dengan tendensi negatif di bulan November 2020 seputar operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Kelautan Perikanan, Eddy Prabowo. Meskipun Biro Humas dan KLN menghadapi situasi yang tidak bersahabat ini, strategi kehumasan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai target realisasi IKU ini tetap dilaksanakan koordinator dan staf substansi Hubungan Masyarakat Biro Humas dan KLN sehingga hasilnya sangat nyaris memenuhi target.

Secara garis besar, strategi yang diterapkan Biro HLN adalah memelihara koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak eksternal yaitu media cetak dan media online, menjaga hubungan yang baik dan harmonis antar unit eselon I KKP yakni unit-unit kerja yang menangani *public relations* dan memantau secara berkala dan fokus atas berita-berita yang dipublikasikan oleh media eksternal sehingga setiap berita dalam sektor kelautan dan perikanan telah melalui proses jurnalistik yang objektif dan berimbang serta sebisa mungkin melibatkan unsur Kementerian Kelautan Perikanan. Staf Hubungan Masyarakat Biro Humas dan KLN bersama jajaran pimpinan dan stafnya juga tidak pernah absen dan terlambat untuk mengusahakan adanya proses klarifikasi dan verifikasi substansi berita yang dipublikasikan oleh media yang dikelola oleh pihak eksternal yang tidak sedikit mengambil bahan dari media yang dikelola oleh Biro Humas dan KLN dan unit kerja KKP lainnya. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, strategi ini cukup ampuh dan efektif menekan jumlah berita dengan sentimen atau tendensi negative kendati nyaris berhasil di tahun 2020 akibat prahara internal KKP di bulan November 2020

Jika membandingkan dengan realisasi indikator kinerja rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP yang diaplikasikan oleh Biro Humas dan KLN pada tahun 2019 dengan realisasi IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan maka tidak dapat dilakukan karena substansi IKU sudah berubah. Perubahan dikarenakan target berita yang akan diukur tidak hanya seputar Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi mencakup sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sumber daya Biro Humas dan KLN khususnya sumber daya finansial mengalami pemotongan akibat revisi pada bulan April 2020. Tetapi sumber daya finansial yang tersisa selalu diupayakan untuk dikelola dengan efektif dan efisien oleh pimpinan dan jajaran Biro Humas dan KLN khususnya koordinator Hubungan Masyarakat dan jajaran stafnya agar target IKU bisa dipenuhi. Setelah revisi anggaran, beberapa program atau kegiatan yang dikelola secara maksimal oleh Biro Humas dan KLN yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang memenuhi target IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan dengan Pimpinan Media Massa,
- b. Kampanye Sosial Media dan Website Kelautan dan Perikanan,
- c. Penguatan Narasi Media Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- d. Konferensi Pers, dan
- e. Publikasi melalui Media Massa

Harus diakui bahwa sumber daya manusia Hubungan Masyarakat Biro Humas dan KLN telah terbentuk sebagai profesional yang tangguh, terlatih dan berpengalaman serta berdedikasi dalam bidang kehumasan, komunikasi publik dan penerangan masyarakat. Meskipun dihadapkan beragam keterbatasan terutama finansial, realisasi IKU Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2020 sangat tipis di bawah target yang direncanakan. Rekomendasi untuk pelaksanaan IKU ini di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan hubungan yang baik dengan pihak pers sebagai pemilik dan pengelola media massa hendaknya tetap dipertahankan dan ditingkatkan, dan
2. Jumlah produk berita atau informasi dan konten di media milik KKP yang dikelola oleh Biro Humas dan KLN seperti kanal YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan dan media lainnya termasuk media sosial agar dapat ditingkatkan karena adanya tren media massa eksternal KKP mengambil informasi dari media sosial resmi instansi sebagai sumber berita,

Beberapa isu dan topik mengemuka dalam pemberitaan sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Di awal tahun 2020, atas arahan presiden, melalui program prioritas tahun 2020 – 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan. Beberapa diantaranya adalah peningkatan pelayanan publik, penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik, budidaya perikanan, sentra kelautan dan perikanan terpadu, pasar ikan modern, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah seperti mendorong budidaya lobster nasional, meningkatkan ekspor rumput laut, menggerakkan ekonomi perikanan di Timur Indonesia dengan SKPT, dan lain sebagainya. KKP juga melakukan beberapa revisi pada Peraturan Menteri (Permen) periode sebelumnya dan sudah berada pada proses finalisasi dan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Namun, terdapat beberapa gesekan yang terjadi dalam proses revisi Permen, seperti penolakan kapal cantrang melaut di Natuna dan rencana kebijakan ekspor benih lobster. Meski begitu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetap melanjutkan rencana untuk merevisi kebijakan-kebijakan tersebut.
2. Untuk mengurangi abrasi di pesisir laut dan menjaga keutuhan pesisir, banyak pihak yang menanam pohon mangrove di beberapa titik di Indonesia. Pihak-pihak yang menanam mangrove diantaranya adalah Polisi, Pemerintah Daerah, Jurnalis, TNI, Partai dan perusahaan-perusahaan swasta. Penanaman mangrove ini juga biasanya dilakukan untuk memperingati hari penting dalam sebuah instansi seperti hari pers nasional atau peringatan hari berdirinya suatu instansi. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) juga beberapa kali mendatangi acara penanaman mangrove di beberapa daerah. Salah satu acara yang dihadiri oleh MKP adalah penanaman pohon mangrove di Desa Ketapang, Banten. Kegiatan ini bertajuk “TNI-Polri Peduli Penghijauan Pantai dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir”. Dalam kegiatan ini akan ditanam 20.000 pohon mangrove dan disebar 10.000 bibit ikan.
3. Pada bulan Maret 2020, wabah virus Corona atau yang disebut Covid-19 sedang menyerang berbagai negara di Dunia. Berbagai dampak dirasakan dari virus yang menjadi pandemi ini. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang merasakan dampaknya. Nyawa dan kesehatan menjadi taruhan akibat adanya pandemi ini. Selain itu, aktifitas sehari-hari pun harus dihentikan karena dapat menularkan banyak orang secara cepat. Kegiatan yang terhenti menyebabkan perekonomian terganggu, termasuk di bidang perikanan. Maka dari itu, KKP juga turut melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kemerosotan ekonomi dan tetap menjalankan berbagai kebijakan yang sudah dirancang. Hal ini dimulai dari kebijakan KKP untuk melakukan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah, menteri KKP cek kesehatan, hingga memastikan pegawai KKP yang diduga tertular virus Covid-19 dengan langsung membawa ke rumah sakit. Selain itu, KKP juga tetap melakukan berbagai kegiatan seperti ekspor perikanan, melakukan sidang terkait penangkapan kapal asing, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia saat ini.
4. Wabah virus Corona atau yang disebut Covid-19 masih terus menyerang berbagai negara di Dunia. Berbagai dampak dirasakan dari virus yang menjadi pandemi ini. Indonesia juga

merupakan salah satu negara yang merasakan dampaknya. Nyawa dan kesehatan menjadi taruhan akibat adanya pandemi ini. Selain itu, aktifitas sehari-hari pun harus dihentikan karena dapat menularkan banyak orang secara cepat. Kegiatan yang terhenti menyebabkan perekonomian terganggu, termasuk di bidang perikanan. Maka dari itu, KKP juga turut melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kemerosotan ekonomi dan tetap menjalankan berbagai kebijakan yang sudah dirancang. Hal ini dimulai dari menjaga stabilitas harga perikanan di seluruh Indonesia, memerintahkan untuk tidak melakukan PHK pada industri perikanan, melakukan kerjasama dengan lembaga atau kementerian terkait untuk mengatasi kelebihan pasokan ikan, menggandeng pengusaha untuk tetap produktif pada masa pandemi dan melakukan realokasi anggaran untuk mengatasi pandemi ini. KKP turut menjadi salah satu kementerian yang ikut serta dalam program yang dibuat dan diminta Presiden Jokowi berupa Padat Karya Tunai, Bantuan Dana Usaha, dan Bantuan Sosial. Presiden melalui Kementerian Keuangan juga sudah melakukan percepatan pencairan dana program padat karya KKP serta Bantuan Sosial. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memiliki lima skema penanganan untuk bantu pengusaha yang terdampak Covid-19 seperti penundaan angsuran dan subsidi dari LPMUKP serta pembebasan pajak bagi pengusaha UMKM dengan omzet di bawah 4,8 Miliar yang salah satunya ditujukan kepada KKP.

5. Sorotan tajam terutama dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditujukan kepada kebijakan KKP yang memberikan izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan. Justifikasi KKP mengizinkan ekspor benih lobster kepada perusahaan-perusahaan tersebut juga sangat dipertanyakan dari aspek ilmiahnya. Kendati demikian, KKP menanggapi bahwa seluruh perusahaan itu merupakan calon eksportir yang telah disaring dan di-review oleh tim yang dibentuk KKP dari 100 permohonan yang masuk dan bukanlah izin ekspor yang diberikan melainkan penetapan calon eksportir. Review dan pengecekan dilakukan oleh tim yang dibentuk KKP sesuai kriteria dan mekanisme yang disusun dan tertuang dalam juknis. Semua perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui Keputusan DJPT Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Wilayah WPP-NRI. Tahapan dan kriteria yang dipenuhi oleh calon eksportir termasuk bukti bahwa telah melakukan budidaya dan restocking. Sorotan juga diberikan kepada kebijakan MKP yang memberikan izin ke kader Gerindra untuk menjadi eksportir benih lobster karena menuai pro kontra kendati MKP siap dikritik soal izin ekspor benih lobster selama telah dilihat proses pemberian izin yang dilakukan oleh tim.
6. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap eksportir benih lobster. Hal itu dilakukan supaya ekspor mereka tidak melebihi kuota yang diberikan. Permintaan ini disampaikan setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster yang sempat ditutup pendahulunya Susi Pudjiastuti. Perwakilan nelayan KNTI mengatakan pengawasan pemerintah kepada perusahaan lebih penting, ketimbang memantau perizinan nelayan lobster KNTI tidak ingin kejadian lama pada periode 2013-2015 terulang. Saat itu, nelayan lobster kolaps lantaran benih lobster banyak dikirim ke Vietnam berharap pemerintah bisa memberikan intervensi pada budidaya lobster. Caranya, melalui transfer teknologi, keterampilan, hingga pendidikan kepada nelayan lobster. Selain itu KKP telah menerbitkan izin untuk 31 perusahaan guna ekspor dan budidaya lobster. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo menyebutkan laut Indonesia sangat luas sehingga perlu membuka kesempatan seluas luasnya dilakukan optimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional tanpa memberi perlakuan khusus bagi para penerima izin. Dari 26 perusahaan yang penerima izin, sejumlah perusahaan tercatat terafiliasi dengan partai Gerindra. Meskipun begitu, Menteri Eddy mengklaim tidak akan terjadi kerusakan lingkungan

akibat izin yang diterbitkan sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya terdapat 26 miliar lobster bertelur di Indonesia. Setiap indukan juga disebutkan dapat bertelur sebanyak 1 juta. Menteri Eddy juga menyebutkan dengan budidaya, maka tingkat kehidupan lobster 2 persen dapat naik menjadi 30 persen hingga 80 persen di penangkaran.

7. Ekspor komoditas perikanan Indonesia tercatat bertumbuh selama pandemi. Berdasarkan data KKP, nilai ekspor perikanan selama Januari—September 2020 Rp 52,14 triliun. Menteri Edhy mengemukakan bahwa nilai tersebut naik 7,92 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sebaliknya, nilai impor perikanan mengalami penurunan sekitar 6,66 persen. Menteri Edhy mengajak untuk mensyukuri hasil kinerja ini karena di tengah pandemi yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, ekspor produk perikanan malah mengalami kenaikan dalam nilai. Amerika Serikat menjadi destinasi ekspor utama produk perikanan Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 40,82%, disusul China 15,41%, Jepang 11,76%, negara-negara Asean 11,67%, dan negara-negara Uni Eropa 5,75%. Adapun dari sisi komoditas, Menteri Edhy menjelaskan bahwa ekspor udang mencapai 39,78 persen dari total ekspor yang terealisasi. Komoditas perikanan terbesar kedua yang diekspor adalah kelompok tuna, cakalang, dan tongkol dengan volume 14,07 persen dari total ekspor. Meskipun ekspor komoditas perikanan mengalami kenaikan, Menteri Edhy mengatakan asda sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah soal belum terpenuhinya standar sejumlah produk perikanan di pasar Jepang. Standar yang belum terpenuhi ini juga diikuti dengan tarif bea masuk untuk pasar Jepang dan Uni Eropa. Amerika Serikat yang menjadi pasar terbesar produk perikanan. Sementara itu, opsi untuk penetrasi pasar baru seperti ke kawasan Timur Tengah dan Afrika pun bukan yang perkara mudah karena ketiadaan kesepakatan dagang dengan negara-negara di kawasan tersebut, terutama terkait dengan perdagangan produk perikanan, membuat akses menjadi tak optimal.
8. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memfasilitasi nelayan memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). SeHAT nelayan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penataan/legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Nelayan jadi dapat membangun tempat tinggal menetap permanen, layak dan lebih sehat. Langkah ini juga dilakukan agar nelayan dapat mudah memperoleh akses modal usaha dengan memanfaatkan sertifikat/aset sebagai agunan. Hingga Oktober 2020, tercatat sebanyak 6.068 calon penerima calon lokasi (CPCL) SeHAT nelayan telah teridentifikasi. KKP bersama Kementerian ATR/BPN terus menggelar sosialisasi dan fasilitasi untuk mengidentifikasi CPCL sehingga di tahun berikutnya SeHAT nelayan dapat diterbitkan. Sinergi dan koordinasi juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pengusul CPCL.
9. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan terjangkit virus corona atau Covid-19. Diduga Edhy terjangkit sejak tanggal 3 September lalu. Diketahui Komisi IV DPR RI merupakan mitra kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daniel melanjutkan setelah mendapatkan kabar tersebut dirinya langsung menghubungi Eddy melalui pesan Whatsapp. Namun secara detail, Daniel (Politisi PKB) tak menanyakan langsung kabar apakah Edhy positif Covid-19 dan menyebut bahwa pesan langsung dibalas oleh Menteri Edhy namun tak menjelaskan Edhy positif Covid 19 namun sekedar mengucapkan terima kasih.
10. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, bapak Aryo Hanggono, meninggal dunia. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo Agung mengatakan, Aryo meninggal setelah menjalani perawatan

intensif di RSPAD Gatot Soebroto akibat Covid-19. Agung menjelaskan bahwa Aryo masuk perawatan pasca terindikasi Covid pada 9 September 2020. Dia menjelaskan hasil pemeriksaan dinyatakan positif. Sebelumnya diketahui Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengabarkan, Aryo mengajukan surat kuasa untuk absen hadir dalam rapat kerja bersama Komisi IV pada Selasa, 15 September 2020 Hal tersebut lantaran Aryo terpapar Covid 19.

11. Presiden Joko Widodo mengatakan terbitnya Undang Undang (UU) Cipta Kerja bertujuan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi Beliau menyebutkan sejumlah regulasi dan prosedur dipangkas untuk semakin mempermudah masyarakat. Salah satunya adalah izin kapal nelayan yang ke depan hanya cukup ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP, tegas Presiden di Istana Bogor. Jika sebelumnya harus mengajukan ke KKP, Kementerian Perhubungan dan instansi yang lain maka mulai sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP imbuah Presiden.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan hal tersebut kendati tidak menyebut secara rinci terkait penangkapan ini. Informasi lebih lanjut perihal penangkapan ini akan disampaikan secara resmi oleh KPK bahwa Edhy ditangkap di Bandara Soekarno Hatta sepulang dari San Fransisco, Amerika Serikat. Sejumlah orang turut ditangkap bersamanya, termasuk istrinya, yang merupakan anggota Komisi V DPR. Ghufron mengonfirmasi penangkapan Edhy terkait ekspor benur atau benih lobster. Penangkapan sekaligus penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK memantik apresiasi dari publik, termasuk para pemerhati lingkungan. Edhy dijerat atas dugaan dugaan transaksi untuk memuluskan proses penetapan calon perusahaan ekspor benih lobster atau benur. Greenpeace Indonesia menyatakan keberhasilan KPK itu menjadi pertanda bahwa kebijakan yang dilakukan Edhy Prabowo terkait ekspor benur tersebut sarat akan kepentingan kelompok tertentu. Ada penyalahgunaan kewenangan yang dinilai berpotensi pada eksploitasi sumber daya kelautan.
13. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menduduki jabatan MKP Ad Interim pasca penetapan Eddy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK. Penunjukan Mentan Syahrul tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020. Mentan Syahrul menggantikan posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan yang sebelumnya juga ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim. Pergantian ini dilakukan karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah melakukan perjalanan dinas keluar negeri.
14. Presiden Joko Widodo melakukan pelantikan terhadap enam orang Menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada hari Rabu 23 Desember 2020. Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumumkan reshuffle kabinet dan memperkenalkan enam orang menteri baru yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju Keenam menteri baru itu antara lain adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan Kemudian Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
15. Usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Bapak Sakti Wahyu Trenggono menyatakan akan melakukan “belanja” semua masalah atau mengidentifikasi persoalan persoalan yang ada di sektor kelautan dan perikanan di masa awal jabatannya serta mengevaluasi semua yang baik untuk dilanjutkan dan tidak hentikan. Pernyataan Menteri Trenggono disampaikan melalui konferensi pers virtual. Selain itu,

Menteri Trenggono mengucapkan terima kasih atas kepercayaan presiden dan wakil presiden yang diberikan untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan.

Relatif tidak ada kendala yang berarti dihadapi oleh Biro Humas dan KLN untuk pelaksanaan IKU ini selama tahun 2020 selain “tsunami” berita penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan di bulan November 2020. Berdasarkan *best practices* yang dilakukan Biro Humas dan KLN dalam kegiatan jurnalisme instansi pemerintahan, proses klarifikasi dan verifikasi substansi berita oleh media bersama KKP mampu memproduksi jumlah berita dengan *tone* netral dan positif yang dominan.



Gambar 12 Menteri Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Masduki

## IK 8: Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Humas dan KLN

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir<br>Renstra | Standar<br>Nasional | Realisasi/<br>Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                         |                     |                       |
| 100%       | 100%      | 100%    | 100%       | 100%      | 100%    | 100%                    | n.a.                | n.a.                  |

Tabel 18 Ringkasan Capaian IK Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Humas dan KLN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Biro Humas dan KLN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Biro Humas dan KLN tahun 2019 adalah sebesar 0%. Realisasi ini setara dengan 200% terhadap target tahun 2020 atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku. Nilai ini adalah nilai temuan BPK terhadap LHP Biro Humas dan KLN tahun anggaran 2019 terhadap realisasi anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 43.463.864.746,4 dari pagu sebesar Rp. 43.832.054.000,-. Beberapa hal yang sudah dilakukan Biro Humas dan KLN sepanjang tahun 2020 dalam mendukung pencapaian target IK ini di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti temuan tahun 2020 (nihil),
2. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah,
3. Menginventarisasi aset,
4. Mereviu laporan keuangan,
5. Menyelesaikan catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi,
6. Perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara,
7. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalkan penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
8. Penguatan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis,
9. Koordinasi dengan Biro Keuangan.



Gambar 13 Kunjungan MKP ke Lamongan dalam rangka mendorong ekspor Ikan Kerapu hidup

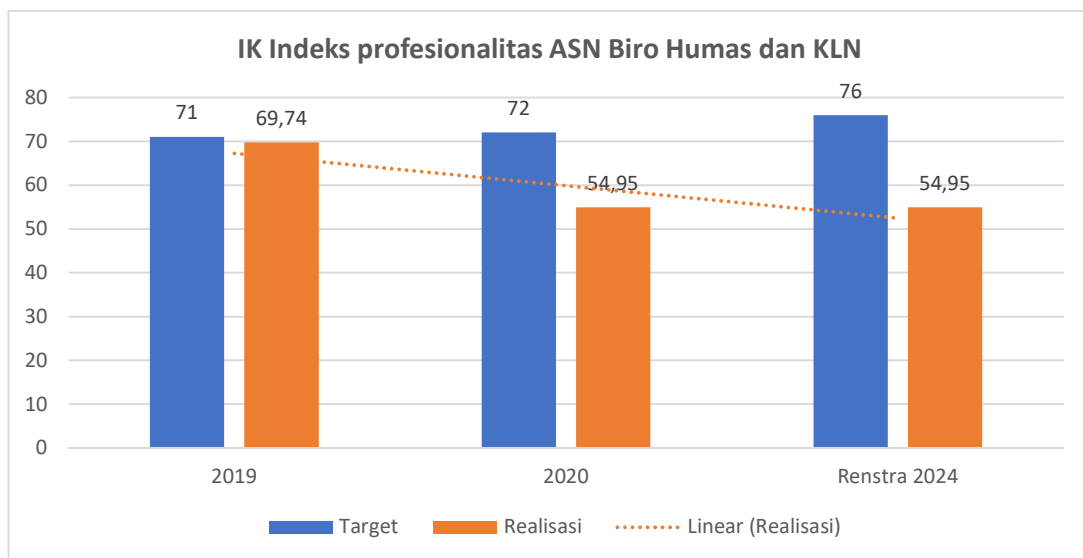


Gambar 14 Kunjungan MKP ke Nelayan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

## IK 9: Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/ Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|--------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                    |
| 72         | 54,95     | 76,32%  | 71         | 69,74     | 98,22%  | 76                   | n.a.             | 72,30%             |

Tabel 19 Ringkasan Capaian IK Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN



Grafik 5 Perbandingan realisasi IK Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN tahun 2019, 2020 dan target akhir Renstra 2024

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan mutu ASN berdasarkan kesesuaian, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Peraturan Menteri Pengelolaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya, pengukuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Di dalam peraturan ini, bobot pengukuran diatur sebagai berikut:

- Dimensi kualifikasi (25%) mengukur kualifikasi Pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai paling rendah,
- Dimensi kompetensi (40%) mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan,
- Dimensi kinerja (30%), mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai iserta perilaku PNS, dan
- Dimensi disiplin (5%) dengan kriteria sebagai berikut:
  - Nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - Nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
  - Nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil pendataan ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Meskipun begitu, karena pada umumnya instansi pemerintah belum melakukan *updating* data pada aplikasi tersebut maka untuk tahun 2019 pengukuran Indeks Profesionalitas menggunakan data penilaian mandiri yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara *offline*. Indeks Profesionalitas ASN nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi (91-100) sampai dengan sangat rendah (0-60).

Untuk penghitungan Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2020 sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi yaitu:

- a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah di-*update* pada aplikasi SIMPEG *online* KKP,
- b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
  - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total, bobot yaitu 40;
  - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 1 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
  - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 1 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.
- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/ pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Realisasi IP ASN Biro Humas dan KLN tahun 2020 sebesar 54,95. Dengan target sebesar 72 maka capaiannya adalah 76,32%, artinya pada tahun 2020 Biro Humas dan KLN belum berhasil mencapai target IK ini. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian IKU yang sama di tahun 2019 maka Biro Humas dan KLN mengalami penurunan baik pada realisasi maupun capaian. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu tahun 2024 sebesar 76 maka capaian IK ini di tahun 2020 baru sebesar 72,30% artinya Biro Humas dan KLN perlu kerja keras agar bisa mencapai target baik untuk tahun 2021 sebesar 73 atau target akhir renstra. Tidak ada ditemukan catatan atau referensi bahwa terdapat standar nasional untuk IK ini.

Jika dirinci kepada level komponen, realisasi IP ASN Biro Humas dan KLN terdiri dari 4 komponen yaitu:

- Kualifikasi= 15,28
- Kompetensi= 10,23
- Kinerja= 24,4
- Disiplin= 5,00

Nilai IP ASN Biro Humas dan KLN termasuk kategori sangat rendah sehingga untuk tahun 2021 dipandang urgen untuk melakukan upaya perbaikan yang lebih serius. Sebetulnya, pada tahun 2020 Biro Humas dan KLN sudah mengusahakan beberapa hal berikut:

- e. Pemutakhiran data Pendidikan dan pencantuman gelar serta input data Pendidikan form1 dari pegawai yang sudah menyelesaikan tugas dan izin belajar,
- f. Meningkatkan nilai kompetensi melalui partisipasi kegiatan diklat secara virtual sambil memastikan agar pegawai mengikuti hanya seminar yang terkait dengan bidang tugasnya,
- g. Meningkatkan nilai kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai perilaku kerja dengan hasilnya berbentuk penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP), dan
- h. Peningkatan disiplin pegawai.

Kendala Biro Humas dan KLN dalam pencapaian target IK ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk nilai kompetensi
  - Tidak adanya pelatihan Diklatpim karena masa pandemi,
  - Pelatihan dengan ketentuan tercapainya Jam Pelatihan sebanyak 20 JP sulit dilakukan oleh pegawai dengan berbagai pertimbangan seperti pembiayaan, kesibukan dan pandemi,
  - Terbatasnya seminar akibat pandemi
- b. Untuk nilai kinerja dilakukan dengan mengambil nilai SKP pada tahun 2019 pada aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja dengan metode 360 derajat semester I dan II pada tahun 2019, pertimbangan belum mengambil nilai PPKP tahun 2020 karena penilaiannya sedang berlangsung dan baru tercapai 80% sehingga akan mempengaruhi nilai.
- c. Untuk nilai disiplin Pada tahun 2021 dengan target 73 (kategori sedang) sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, komponen perhitungan Diklat Teknis 20 JP dan Seminar, yaitu Diklat Teknis 20 JP dihitung 1 (satu) tahun terakhir dan Seminar dihitung 2 (dua) tahun terakhir.

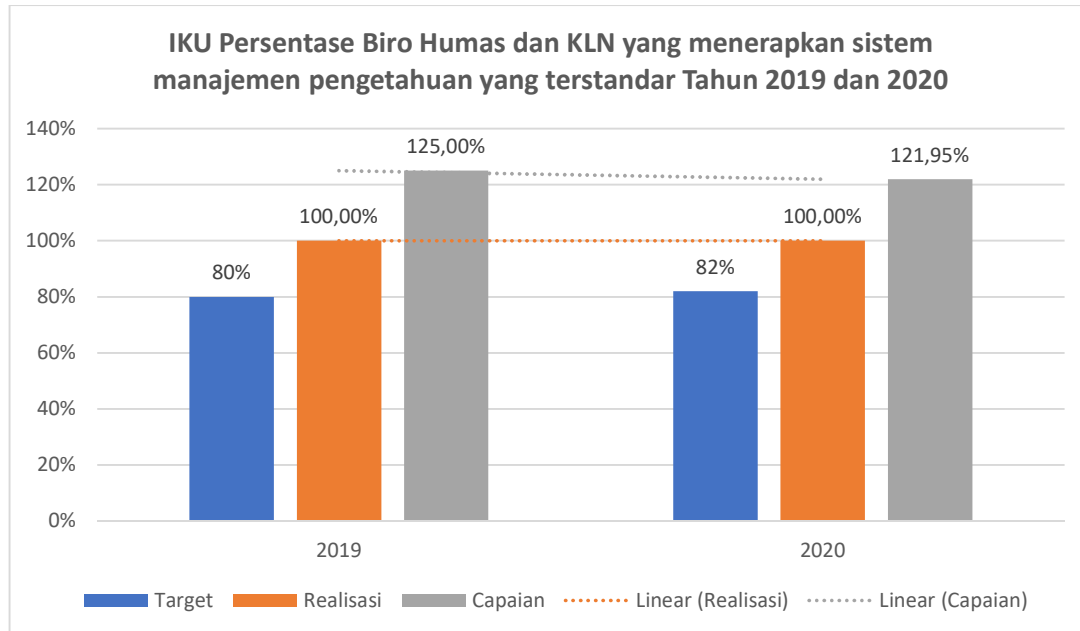
Sehubungan dengan semakin tingginya target IK ini pada tahun-tahun mendatang, maka terdapat beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Biro Humas dan KLN, yaitu:

- a. Melakukan pemutakhiran data Pendidikan terakhir untuk meningkatkan aspek kualifikasi,
- b. Mengusulkan pejabat yang belum mengikuti diklat fungsional khususnya yang belum pernah,
- c. Mengusulkan penyelenggaraan pelatihan secara virtual melalui aplikasi e-learning,
- d. Mengusulkan tugas dan izin belajar ke Badan RSDMKP,
- e. Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai, dan
- f. Penerapan hukuman disiplin bagi pegawai.

## IKU 10: Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 82%        | 100%      | 121,95% | 80%        | 100%      | 125%    | 90%                  | n.a.             | 111,11%           |

Tabel 20 Ringkasan Capaian IKU Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar



Grafik 6 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase Biro Humas dan KLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2019 dan 2020

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi dimana yang dipilih oleh KKP adalah aplikasi bitrix 14 ([www.kinerjakkp.bitrix24.com](http://www.kinerjakkp.bitrix24.com)) yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan data dan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pencapaian hasil pembangunan kelautan dan perikanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data dan informasi juga diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang, sehingga dapat disusun arah dan program pembangunan yang optimal, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi dan capaian atas IKU Persentase Satuan Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2020 dan progress kinerja untuk IKU jika dibandingkan dengan perolehan kinerja pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas.

Capaian untuk IKU ini diperoleh dari aplikasi Bitrix24 yang terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Dokumen: Dokumen yang harus diunggah di aplikasi Bitrix24 yaitu dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (triwulanan) dengan bobot 20%,
- Keikutsertaan: Di lingkup Unit Eselon II, Pejabat Eselon II hingga Pejabat Eselon IV wajib bergabung di aplikasi Bitrix24. Sedangkan untuk level staf, hanya 24 staf (setara 2 staf per Unit Eselon IV) yang wajib untuk bergabung dengan bobot 40%, dan
- Keaktifan: Indikator ini hanya berlaku untuk Pejabat Eselon II hingga Pejabat Eselon IV (staf tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian). Setiap pejabat agar dapat memberikan postingannya setidaknya sekali setiap triwulan dengan bobot 40%.

Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab penghitungan IKU ini, untuk akhir tahun 2020 ditetapkan targetnya sebesar 82%, Hasil penghitungan yang diumumkan Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal, Biro Humas dan KLN berhasil meraih 100%. Dengan realisasi tersebut maka capaian menjadi 121,95% dan berdasarkan aplikasi kinerjaku maka capainnya menjadi 120%. Tentu saja ini berarti bahwa kinerja Biro Humas dan KLN melampaui target tahun 2020. Adapun upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya yaitu memastikan capaian masing-masing indikator berada pada nilai maksimal dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyelesaikan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu dan ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan KLN serta hasilnya diunggah ke dalam drive yang disediakan Biro Perencanaan,
- Memastikan semua pejabat struktural Biro Humas dan KLN sudah mengunggah berita atau informasi tertulis yang berasal dari atau terkait dengan pekerjaannya sebelum 30 Desember 2020 ke aplikasi [www.kinerjakp.bitrix24.com](http://www.kinerjakp.bitrix24.com) dengan memenuhi elemen 5W+1H (*what, when, who, why, where* dan *how*) serta dilengkapi dokumentasi,
- Memantau progress pengunggahan informasi atau berita ke [www.kinerjakp.bitrix24.com](http://www.kinerjakp.bitrix24.com) sembari mengevaluasi isi unggahan apakah sudah memenuhi elemen yang diwajibkan.
- Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pegawai Pusat Data, Statistik dan Informasi dalam rangka memastikan performa Biro Humas dan KLN atas IKU ini berlangsung *smooth* dan memenuhi target baik dalam substansi maupun detilnya.

Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian IKU yang sama pada periode tahun 2019 maka pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan pada realisasi tetapi sedikit turun pada capaian karena target tahun 2019 adalah 80% sehingga pembagiannya lebih kecil. Perlu dicatat bahwa metode penghitungan IKU ini di tahun 2020 serta prosedur atau tata cara untuk memenuhi target IKU ini mengalami perubahan dimana di tahun 2019 setiap pejabat struktural wajib melakukan pengunggahan minimal 1 kali dalam setahun dan tidak perlu memenuhi kaidah 5W1H namun di tahun 2020, selain harus memenuhi kaidah 5W1H yang dilengkapi dokumentasi, pengunggahan harus dilakukan setiap triwulan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa syarat di tahun 2020 lebih berat dibandingkan tahun 2019 untuk memperoleh nilai IKU yang sama.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan Biro Humas dan KLN memenuhi target IKU ini di tahun 2021, berikut adalah rencana Biro Humas dan KLN mewujudkan target IKU:

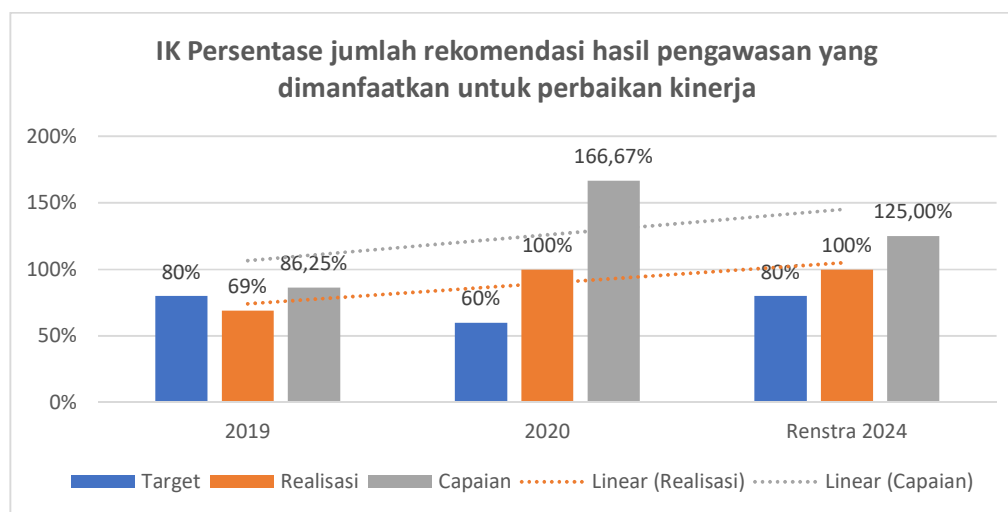
- a. Sosialisasi secara berkala dan tidak terputus kepada semua pejabat yang berkewajiban aktif mengunggah berita ke [www.kinerjakp.bitrix24.com](http://www.kinerjakp.bitrix24.com),
- b. Mengikuti setiap kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan IKU,
- c. Memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan dengan tepat waktu.

## IK 11: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Biro Humas dan KLN berdasarkan LHP (LHP Audit Reviu dan Evaluasi) baik dalam bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2019 sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Biro Humas dan KLN yang menjadi objek pengawasan.

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 60%        | 100%      | 166,67% | 80%        | 69%       | 86,25%  | 80%                  | n.a.             | 125%              |

Tabel 21 Ringkasan Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN



Grafik 7 Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN Tahun 2019 dan 2020

Pengejewantahan Indikator Kinerja (IK) ini dimulai setelah Biro Humas dan KLN menerima rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Selanjutnya, Biro Humas dan KLN harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu, baik secara langsung atau tidak langsung Biro Humas dan KLN dianggap sudah memanfaatkan atau mendayagunakan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Pada tahun 2020 tidak ada rekomendasi hasil pengawasan untuk Biro Humas dan KLN. Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalam Tabel di atas, realisasi Biro Humas dan KLN untuk IK ini pada tahun 2020 disimpulkan besarnya adalah 100%. Dengan target tahun ditetapkan sebesar 60% (juga target tahun 2020 sebesar 100%) maka capaian menjadi 100%. Pada tahun berikutnya tidak tertutup kemungkinan akan muncul rekomendasi hasil pengawasan untuk Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal yang harus dimanfaatkan guna diperoleh perbaikan kinerja dan harus ditindaklanjuti Biro Humas dan KLN.

Jika dibandingkan dengan realisasi untuk IK ini pada periode yang sama di tahun 2019 maka tidak mengalami perubahan. Namun karena target diturunkan menjadi 45% maka capaiannya mengalami peningkatan. Dipandang dari sudut realisasi, hasil tahun 2020 menunjukkan kinerja Biro Humas dan KLN untuk memanfaatkan untuk memperbaiki kinerjanya dengan menggunakan rekomendasi hasil pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal dan konsisten. Untuk tahun 2021, kinerja ini harus dipertahankan agar dapat selalu memenuhi target akhir tahun 2021 yaitu 60%

Pada tahun 2020, terdapat perubahan/perbaikan manual IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN yaitu sebelumnya pada tahun 2019 kategorisasi berdasarkan status proses/tuntas, namun pada tahun 2020 kategorisasi capaian meningkat menjadi status tuntas/selesai, sehingga capaian IKU ini untuk tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup Biro Humas dan KLN pada tahun 2020 sebesar 0 (nol) sehingga tidak ada yang perlu ditindaklanjuti dan implikasinya adalah realisasi menjadi 100%. Dengan target sebesar 60% maka capaian IK menjadi 166,67% atau menurut aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) capaiannya sebesar 120%.

Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Humas dan KLN tidak pernah menentang langkah-langkah Sekretariat Jenderal melaksanakan IK ini sepanjang tahun 2020 yaitu:

- a. Menerapkan pengendalian internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya preventif pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal
- b. Menyusun laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didalamnya mencakup unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian Intern terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan,
- c. Menyusun laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian internal yang memadai,
- d. Menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi/temuan dengan berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal,
- e. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan rekomendasi,
- f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal sebagai mitra Sekretariat Jenderal dalam penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja.

Rencana pada tahun anggaran berikutnya, Biro Humas dan KLN akan mencoba untuk berpedoman kepada beberapa butir rekomendasi yang dirumuskan Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan IK persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN yaitu sebagai berikut:

- a. Pengendalian Internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Humas dan KLN dengan dukungan pendampingan dari unit kerja terkait lingkup KKP seperti Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan,
- b. Menyusun laporan SPIP dan PIPK dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan meminimalisasi risiko yang bisa atau akan terjadi,
- c. Menghadiri rapat koordinasi dengan Inspektorat I sebagai Mitra Sekretariat Jenderal apabila diundang.

## IK 12: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker Kementerian dan Lembaga. IKPA bisa digunakan sebagai alat manajerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. IKPA terdiri dari 13 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. Revisi DIPA,
- b. Deviasi halaman III DIPA,
- c. Pagu minus,
- d. Data kontrak,
- e. Pengelolaan UP dan TUP,
- f. LPJ Bendahara,
- g. Dispensasi SPM
- h. Penyerapan anggaran,
- i. Penyelesaian tagihan,
- j. Konfirmasi capaian output,
- k. Retur SP2D,
- l. Renkas, dan
- m. Kesalahan SPM.

IKPA disampaikan setiap bulannya melalui aplikasi Monev Pelaksanaan Anggaran dalam menu OMSPAN Kementerian Keuangan yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi:

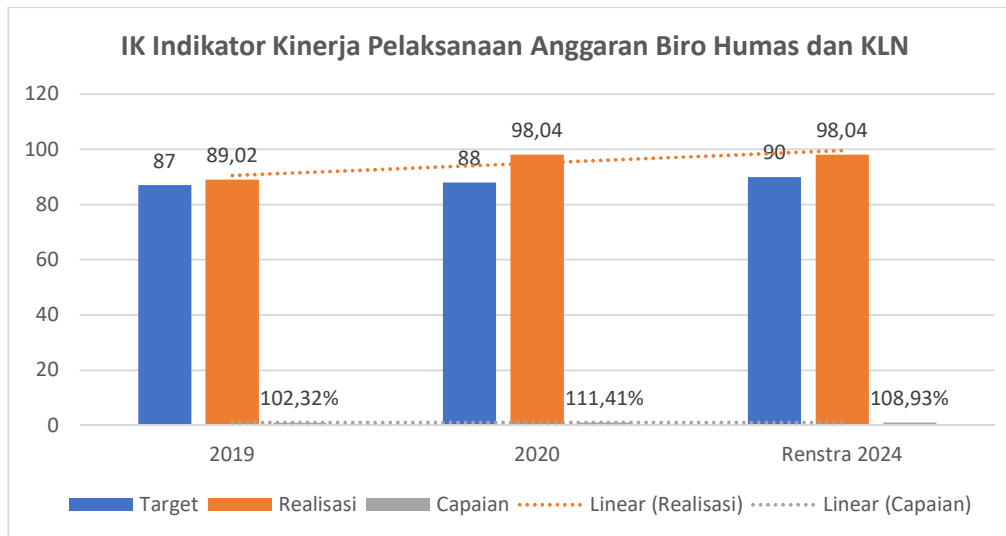
- a. Kesesuaian terhadap perencanaan,
- b. Efektifitas pelaksanaan anggaran,
- c. Efisiensi pelaksanaan anggaran,
- d. Kepatuhan terhadap regulasi,

Penyampaian IKPA setiap bulan melalui aplikasi Monev Pelaksanaan Anggaran dalam menu OMSPAN Kementerian Keuangan dengan harapan agar pengelolaan APBN menjadi semakin baik dan berkualitas, terdapat upaya pencapaian terbaik dari setiap unit kerja dan mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang pruden dan berkualitas. Adapun realisasi, detil realisasi, target dan capaian IK ini di Biro Humas dan KLN dapat dilihat dalam dua tabel dan satu grafik di bawah ini.

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019 |           |         | Target Akhir<br>Renstra | Standar<br>Nasional | Realisasi/<br>Renstra |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |                         |                     |                       |
| 88 (Baik)  | 98,04     | 111,40% | 87         | 89,02     | 102,32% | 90                      | n.a.                | 108,93%               |

Tabel 22 Ringkasan Capaian IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN

Nilai realisasi IK di atas adalah berdasarkan pemantauan pada aplikasi OMSPAN per tanggal 15 Januari 2021, sehingga diketahui IKPA Biro Humas dan KLN tahun 2020 adalah 98,04 yang artinya melampaui target sebesar 88. Oleh karena itu capaiannya IK ini menjadi 111,40%. Jika dibandingkan dengan IK yang mirip di tahun 2019 maka Biro Humas dan KLN berhasil memperoleh peningkatan dalam realisasi dan capaian. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 maka realisasi IK ini juga sudah berhasil melampaui.



Grafik 8 Perbandingan realisasi dan capaian IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN Tahun 2019 dan 2020

| Uraian Satker                                       | Keterangan  | Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan |                          |            | Kepatuhan Terhadap Regulasi |                        |               |                | Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan |                      |                           |            | Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan |               |       | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------|-------|-------------|----------------|------------------------------------------|
|                                                     |             | Revisi DIPA                               | Deviasi Halaman III DIPA | Pagu Minus | Data Kontrak                | Pengelolaan UP dan TUP | LPJ Bendahara | Dispensasi SPM | Penerapan Anggaran               | Penyelesaian Tagihan | Konfirmasi Capaian Output | Retur SP2D | Renkas                         | Kesalahan SPM |       |             |                |                                          |
| BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI | Nilai       | 100,00                                    | 75,36                    | 100,00     | 100,00                      | 100,00                 | 100,00        | 100,00         | 100,00                           | 100,00               | 83,33                     | 100,00     | 0,00                           | 100,00        | 83,33 | 85%         | 98,04          |                                          |
|                                                     | Bobot       | 0                                         | 0                        | 5          | 15                          | 8                      | 5             | 5              | 15                               | 12                   | 10                        | 5          | 0                              | 5             |       |             |                |                                          |
|                                                     | Nilai Akhir | 0,00                                      | 0,00                     | 5,00       | 15,00                       | 8,00                   | 5,00          | 5,00           | 15,00                            | 12,00                | 8,33                      | 5,00       | 0,00                           | 5,00          |       |             |                |                                          |
|                                                     | Nilai Aspek | 100,00                                    |                          |            | 100,00                      |                        |               |                | 95,83                            |                      |                           |            | 100,00                         |               |       |             |                |                                          |

Tabel 23 Detil Realisasi IK IKPA Biro Humas dan KLN tahun 2020

Beberapa rencana langkah selanjutnya di tahun mendatang dalam pelaksanaan IK ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan UP: Biro Humas dan KLN agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat,
2. Data kontrak: Biro Humas dan KLN agar selalu meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN,
3. Pengembalian kesalahan SPM: Biro Humas dan KLN agar selalu meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang

telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN,

4. Retur SP2D: Teliti dalam memproses dokumen pembayaran terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat retur SP2D, berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya dengan jangka waktu maksimal 7 hari kerja,
5. Halaman III DIPA: Jika Biro Humas dan KLN memiliki deviasi tinggi maka perlu melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administrative penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan dan satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker,
6. Revisi DIPA: Biro Humas dan KLN agar selektif dalam revisi DIPA kategori Pagu Tetap, batasan dan frekuensi revisi,
7. Penyelesaian Tagihan: Biro Humas dan KLN agar disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP dan teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP),
8. LPj Bendahara: Biro Humas dan KLN agar disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan memastikan data LPJ telah disetujui KPPN pada aplikasi SPRINT
9. Perencanaan kas (Renkas): Biro Humas dan KLN agar disiplin dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar
10. Penyerapan anggaran: Biro Humas dan KLN hendaknya selalu memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif, dan memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun,
11. Pagu minus: Jika Biro Humas dan KLN memiliki pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minustersebut,
12. Dispensasi SPM: Biro Humas dan KLN agar selektif dalam pemberian dispensasi SPM yang terlambat,
13. Konfirmasi capaian output: Konfirmasi capaian output dihitung untuk semua ouput yang dikelola Biro Humas dan KLN satker dengan melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan Sakti secara disiplin setiap bulan.

### IK 13: Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Pada tahun 2020, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Biro Humas dan KLN. IK ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Perpres 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dapat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Aspek Implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program KL. Aspek Konteks adalah evaluasi kinerja anggaran untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKAKL termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah

Formula untuk mengukur indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Aspek Implementasi
  - a.1. Capaian Keluaran Output Program  
Perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator
  - a.2. Capaian Keluaran Output Kegiatan  
Perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran
- g. Penyerapan Anggaran  
Membandingkan antara realisasi dengan pagu anggaran
- h. Efisiensi  
Selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran
- i. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan  
Menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif
2. Aspek Manfaat
  - a. Capaian Sasaran Strategis  
Perbandingan antara capaian indikator sasaran strategis dan target indikator sasaran strategis
  - b. Capaian Sasaran Program  
Perbandingan antara capaian indikator sasaran program dan target indikator sasaran program
3. Aspek Konteks

Form evaluasi kualitas atas informasi kinerja terdapat pada Aplikasi SMART DJA. Realisasi IK ini diperoleh melalui aplikasi SMART DJA dengan target tahun 2020 sebesar 85. Realisasi dan capaian IK NKA bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

| Tahun 2020 |           |         | Tahun 2019   |           |         | Target Akhir Renstra | Standar Nasional | Realisasi/Renstra |
|------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|----------------------|------------------|-------------------|
| Target     | Realisasi | Capaian | Target       | Realisasi | Capaian |                      |                  |                   |
| 85         | 70,92     | 83,43%  | IK Baru 2020 |           |         | 89                   | n.a.             | 79,68%            |

Tabel 24 Ringkasan Capaian IK NKA Biro Humas dan KLN tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi IK NKA Biro Humas dan KLN tahun 2020 adalah 70,92 yang berarti gagal mencapai target yang ditetapkan yakni 85. Capaian IK ini di bawah 100% yaitu 83,43%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu tahun 2024 sebesar 89 maka capaian IK ini di tahun 2020 lebih rendah lagi yaitu 79,68%. Tentu saja realita ini harus mendapat perhatian khusus di tahun 2021 diantaranya terhadap beberapa indikator dalam NKA seperti penyerapan anggaran, konsistensi, rata-rata nilai kinerja satker dan efisiensi. Tentu saja upaya ini bertujuan agar tidak terulang kembali kegagalan pencapaian target IK.

Mengacu kepada informasi yang disampaikan oleh Biro Perencanaan, maka diketahui terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan IKA NKA pada tahun 2020, diantaranya adalah:

- a. Proses perbaikan informasi kinerja pada aplikasi SMART DJA membutuhkan perbaikan secara berjenjang dimulai dari aplikasi Krisna, Satu DJA dan SMART DJA,
- b. Pemahaman dan tingkat partisipasi satker dalam menyampaikan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA masih rendah,
- c. Capaian output kegiatan sebagian terselesaikan pada akhir tahun,
- d. Terdapat operator baru yang perlu diberikan sejumlah pembinaan dan sosialisasi perihal pengisian aplikasi SMART DJA,
- e. Terdapat perubahan system SMART DJA pada awal tahun dan tengah tahun yang mengakibatkan operator harus beradaptasi, dan
- f. Kurangnya komitmen menginput aplikasi SMART DJA secara berkala dan meningkatkan capaian output sehingga menghasilkan efisiensi anggaran yang akan berdampak pada capaian nilai kinerja anggaran.

Langkah yang akan diambil Biro Humas dan KLN dalam rangka implementasi IK NKA pada tahun 2021 merujuk kepada sejumlah informasi yang disampaikan oleh Biro Perencanaan, diantaranya adalah:

- a. Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga,
- b. Apabila terdapat revisi/penyesuaian informasi kinerja, Biro Humas dan KLN agar segera mengidentifikasi kendala-kendala dalam pengisian aplikasi SMART DJA dan melakukan penyesuaian terkait dengan informasi kinerja, target, rencana penarikan dana, capaian keluaran program, capaian sasaran program dan sebagainya, dan segera melakukan perbaikan melalui aplikasi KRISNA, SAKTI dan Satu DJA,
- c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan terkait langkah-langkah revisi informasi kinerja pada aplikasi Krisna dan Satu DJA,
- d. Biro Humas dan KLN agar berperan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi NKA serta melakukan pembinaan pengisian aplikasi SMART DJA terhadap satker di lingkungannya,
- e. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Keuangan dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan.



Gambar 15 Menteri KP Ad Interim Melepas Ekspor Produk Perikanan di Pelabuhan Tj Priok



Gambar 16 Bapak Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan pidato perdana di KKP setelah dilantik Presiden RI sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di akhir tahun 2020

## Realisasi Anggaran Biro Humas dan KLN Tahun 2020

Realisasi penyerapan anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Selain itu anggaran merupakan hal yang dicapai dalam periode tertentu. Di instansi pemerintah, anggaran merupakan hal sangat penting karena menjadi dasar bagi pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam manajemen organisasi, anggaran dapat menjadi alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi serta instrument untuk melakukan pengendalian dalam rangka memberikan rencana detail.

Realisasi anggaran memberikan informasi atas penyerapan atau realisasi dalam bentuk entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi realisasi belanja dari pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Realisasi anggaran berguna bagi para pembaca dan pengguna laporan kinerja ini dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya, akuntabilitas dan ketaatan dalam hal pelaporan capaian kinerja terhadap anggaran.

Hingga akhir tahun 2020, realisasi anggaran Biro Humas dan KLN sebesar Rp. 16.268.270.866,- atau jika dihitung persentasenya adalah sebesar 98,90%. Besar realisasi dan pagu anggaran Biro Humas dan KLN dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

| No | Output                                    | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) |
|----|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 6.780.259.000 | 6.775.423.242  |
| 2  | Layanan Protokoler                        | 6.641.844.000 | 6.638.526.047  |
| 3  | Layanan Kerja Sama Internasional          | 2.839.891.000 | 2.687.521.577  |
| 4  | Layanan Perkantoran                       | 186.000.000   | 166.800.000    |
|    |                                           | Jumlah =      | 16.268.270.866 |

Tabel 25 Realisasi Anggaran Biro Humas dan KLN tahun 2020

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Humas dan KLN tahun 2020 menyajikan keberhasilan dan kesuksesan yang tertunda dalam rangka mencapai sasaran strategis Biro Humas dan KLN yaitu Tata kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Humas dan KLN sepanjang tahun 2020. Perlu diingat bahwa perjalanan tahun 2020 sangat diwarnai oleh terjadinya bencana global yaitu pandemi covid-19 yang banyak memberi dampak negatif kepada semua negara beserta jajaran pemerintahannya dimana Biro Humas dan KLN merupakan salah satu unit kerja dalam pemerintahan pusat di Indonesia, dalam aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan sosial. Dan khusus untuk Kementerian Kelautan Perikanan, tahun 2020 mempunyai kisah tersendiri yang banyak disesali semua pihak yaitu ditangkapnya Menteri Edhy Prabowo oleh KPK. Tentu saja kejadian ini memberi pukulan terhadap suasana kerja di KKP pada umumnya dan Biro Humas dan KLN pada khususnya.

Meskipun didera dua masalah berat sebagaimana disebutkan di atas, secara umum Biro Humas dan KLN mampu mencapai sasaran strategis kendati terdapat beberapa Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini didasarkan kepada hasil dari aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) yang menunjukkan bahwa Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Biro Humas dan KLN tahun 2020 di atas 90% yaitu 104,20%. Pencapaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya dengan menjaga komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh jajaran Biro Humas dan KLN beserta semua *stakeholder* Biro Humas dan KLN.

#### Kesimpulan

1. Realisasi 13 IK dan IKU Biro Humas dan KLN tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  - a. IK 1 yaitu Komponen nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan KLN realisasinya sebesar 4,11%. Target tahun 2020 adalah 3,55 maka realisasi IKU ini melampaui target sehingga capaian sebesar 115,77%,
  - b. IK 2 yaitu Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan realisasinya sebesar 4,24%. Target tahun 2020 adalah 5 maka realisasi IKU ini belum berhasil mencapai target sehingga capaian sebesar 84,80%,
  - c. IKU 3 yaitu Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Humas dan KLN realisasinya 89,05. Target tahun 2020 adalah 90 maka realisasi IKU ini nyaris mencapai target dengan capaian sebesar 98,94%,
  - d. IKU 4 yaitu Nilai keterbukaan informasi publik realisasinya 92,08. Target tahun 2020 adalah 81 maka realisasi IKU ini melampaui target sehingga capaiannya menjadi 113,68%,
  - e. IKU 5 yaitu Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama realisasinya sebesar 102,82%. Target tahun 2020 adalah 90% maka realisasi IKU ini sukses melampaui target dengan capaian sebesar 114,24%,
  - f. IKU 6 yaitu Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolkan acara dan perjalanan pimpinan/Menteri realisasinya 100%. Target tahun 2020 adalah 100% maka realisasi IKU ini tepat memenuhi target sehingga capaiannya adalah 100%,
  - g. IKU 7 yaitu rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan realisasinya sebesar 84,65%. Target tahun 2020 adalah lebih besar daripada 85% maka realisasi IKU ini nyaris memenuhi target dengan capaian sebesar 99,59%,

- h. IK 8 yaitu persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Humas dan KLN realisasinya 100%. Target tahun 2020 adalah 100% maka realisasi IKU ini tepat memenuhi target sehingga capaiannya adalah 100%,
  - i. IK 9 yaitu Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN realisasinya 54,95. Target tahun 2020 adalah 72 maka realisasi IK ini gagal memenuhi target dengan capaian hanya 76,32%,
  - j. IKU 10 yaitu persentase unit kerja lingkup BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar realisasinya sebesar 100%. Target 2020 sebesar 82% maka realisasi IKU ini melampaui target sehingga capaiannya adalah 121,95% atau jika berdasarkan aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 120%,
  - k. IK 11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Humas dan KLN realisasinya adalah sebesar 100%. Dengan target triwulan III 2020 sebesar 60% maka realisasi IK berhasil melampaui target sehingga capaiannya menjadi 166,67% atau jika berdasarkan aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 120%,
  - l. IK 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan KLN realisasinya sebesar 98,04. Dengan target tahun 2020 sebesar 88 maka realisasi IK berhasil melampaui target sehingga capaiannya menjadi 111,41%,
  - m. IK 13 Nilai Kinerja Anggaran Biro Humas dan KLN realisasinya sebesar 70,92. Dengan target tahun 2020 sebesar 85 maka realisasi IK tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 83,44%
2. Untuk mewujudkan seluruh kinerja (IK dan IKU) sepanjang tahun 2020, Biro Humas dan KLN telah menyerap anggaran sebesar Rp. 16.268.270.866,- dari pagu sebesar anggaran Rp. 16.447.994.000,-. Hal ini berarti bahwa di tahun 2020 Biro Humas dan KLN menyerap 98,90% dari total anggaran (APBN) yang dialokasikan membiayai pelaksanaan seluruh target kinerja Biro Humas dan KLN.

## Saran

Memperhatikan hasil dan analisis atas capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro Humas dan KLN tahun 2021 maka rencana yang direkomendasikan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap semua Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama yang capaiannya di tahun 2020 masih di bawah 100%, Biro Humas dan KLN di tahun 2021 harus memberi perhatian dan upaya lebih besar agar capaiannya bisa menjadi 100% atau lebih, apalagi target Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama tahun 2021 umumnya lebih besar dibandingkan tahun 2020.
2. Mempertahankan dan etos kinerja yang dipegang dan ditunjukkan selama Triwulan III sebagai implementasi nilai budaya kerja Biro Humas dan KLN seperti disiplin, kebersamaan, keterbukaan, proaktif, responsif dan tanggung jawab.
3. Memantapkan koordinasi di lingkup internal Biro Humas dan KLN dan dengan pihak eksternal yaitu para mitra kerja sama Biro Humas dan KLN guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target semua IKU,
4. Terkait dengan penyerapan anggaran, perlu ditekankan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan sinkronisasi waktu pelaksanaan penyerapan anggaran dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepastian atas efisiensi penganggaran kegiatan.

## BAB IV

### LAMPIRAN



#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Tri Prasetyo**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal

  
Antam Novambar

Pihak Pertama  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan  
Kerja Sama Luar Negeri

  
Agung Tri Prasetyo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
KERJA SAMA LUAR NEGERI**

| SASARAN STRATEGIS |                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                 | TARGET    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                 | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri | 1 Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan KLN (nilai)                                     | 3,55      |
|                   |                                                                                                | 2 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan                              | 5         |
|                   |                                                                                                | 3 Nilai Rekonsiliasi kinerja BHKLN (Nilai)                                                                        | 90        |
|                   |                                                                                                | 4 Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)                                                                      | 81        |
|                   |                                                                                                | 5 Persentase dokumen yang diterima/ ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama                                     | 90%       |
|                   |                                                                                                | 6 Persentase tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolan acara dan perjalanan Pimpinan/Menteri       | 100%      |
|                   |                                                                                                | 7 Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan    | >85%      |
|                   |                                                                                                | 8 Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup BHKLN                                                                | 100%      |
|                   |                                                                                                | 9 Indeks profesionalitas ASN BHKLN (Indeks)                                                                       | 72        |
|                   |                                                                                                | 10 Persentase BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)                              | 82        |
|                   |                                                                                                | 11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN (%) | 60        |
|                   |                                                                                                | 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro HKLN                                                               | Baik (88) |
|                   |                                                                                                | 13 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai)                                                                           | 85        |

**Kegiatan** : Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri  
**Jumlah Anggaran** : Rp 16.447.994.000,-

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal



Antam Novambar

Pihak Pertama,  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri



Agung Tri Prasetyo